

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
IMPLEMENTASI PROGRAM
PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN MELALUI
BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DI KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG

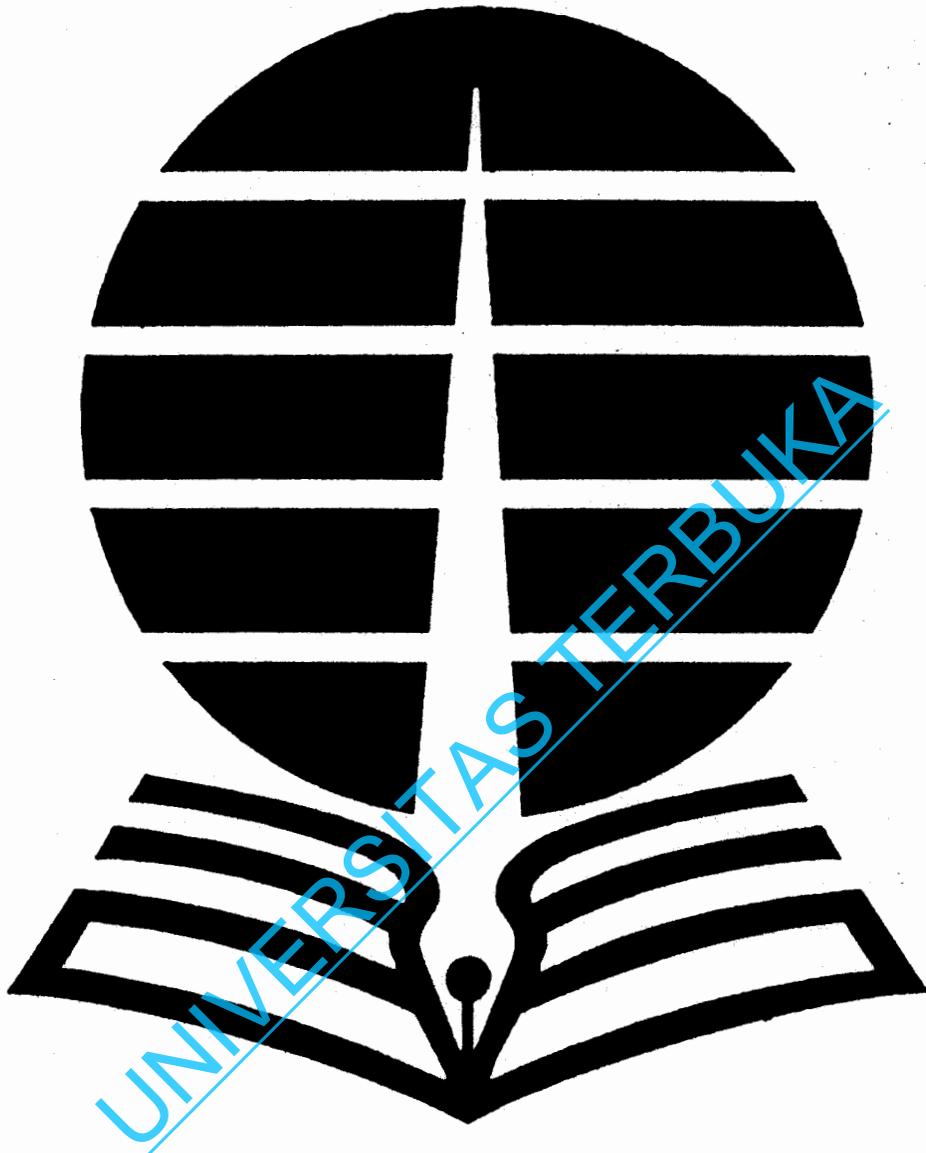


**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Publik
Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik**

Disusun Oleh:

NUSATI ON
NIM 015535673

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010



ABSTRACT**POOR FAMILY EMPOWERMENT PROGRAM IMPLEMENTATION
THROUGH ECONOMIC BUSINESS ASSISTANCE PRODUCTIVE (UEP)
BUKIT INTAN SUBDISTRICT PANGKALPINANG CITY**

Nusation
NIM 015535673
Open University
Nusation08@yahoo.com

Keywords: empowerment and independence

Research on the Poor Family Empowerment Program was conducted at Bukit Intan Subdistrict, one of the five districts in the city which has never received the program of empowerment of poor families. This study aimed to know the implementation of Poor Family Empowerment Program in the district of Bukit Intan and what factors were impeded the implementation, in accordance with the duties and functions as the Department of Social Welfare program manager.

This study used descriptive data analysis. Method of qualitative analysis model was used interactively (interactive model of analysis) and triangulation techniques during the program initiated in 2006 s / d in 2009. Triangulation of research data obtained by clicking on the cross check of information between the informant with one another. Data was collected by interviewing in depth (depth interview), and participant observation, and documentation. As an indicator of research viewed from the benchmark Input (input), process (process), outputs (output), benefits (outcomes) and impact (impact).

The results of this research was the implementation of Poor Family Empowerment Program conducted in Sub Poor Bukit Intan from 2006 until 2009 which was implemented among other productive economic assistance provided in accordance with the targets, namely the poor, who tend to be extremely empowering process relies on the availability of government budget only, thus ignoring the function and role as community and business stakeholders in regional development of social welfare, low commitment and allocation of adequate budget to accelerate the empowerment of poor families. The advice is the program manager needs to build a synergistic communication and coordination within and across sectors to accelerate the handling of social problems of poor families and it need to be more independent and have the ability to improve quality of life and livelihoods.

ABSTRAK**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN
MELALUI BANTUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DI KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG**

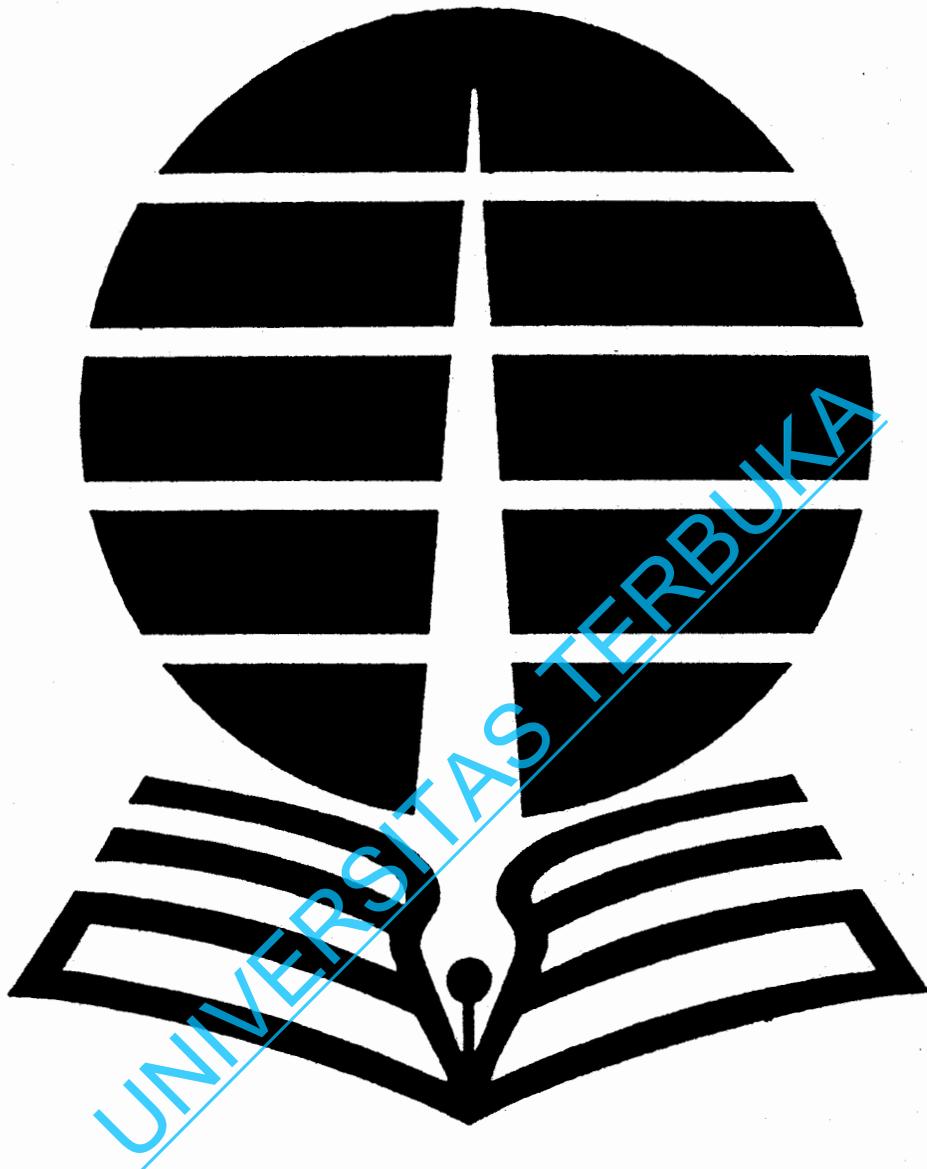
Nusation
NIM 015535673
Universitas Terbuka
Nusation08@yahoo.com

Kata Kunci: pemberdayaan dan kemandirian

Penelitian tentang Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dilakukan di Kecamatan Bukit Intan, sebagai salah satu dari lima kecamatan yang ada di kota Pangkalpinang yang pernah memperoleh program pemberdayaan keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di kecamatan Bukit Intan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial selaku pengelola program.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (interactive model of analysis) dan teknik triangulasi selama program digulirkan tahun 2006 s/d 2009. Triangulasi data dari penelitian diperoleh dengan meng-cross check informasi antara informan yang satu dengan yang lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi lapangan dan partisipan, serta dokumentasi. Sebagai indikator penelitian dilihat dari tolok ukur Masukan (input), Proses (process), Keluaran (output), Manfaat (outcomes) dan Dampak (impact).

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dilakukan di Kecamatan Bukit Intan dari tahun 2006 s/d 2009 yang sudah dilaksanakan antara lain bantuan usaha ekonomi produktif diberikan sesuai dengan sasaran, yaitu keluarga miskin, proses pemberdayaan yang cenderung sangat bertumpu pada tersedianya anggaran pemerintah semata, sehingga mengabaikan fungsi dan peran masyarakat dan dunia usaha sebagai stakeholders pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, rendahnya komitmen dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk mempercepat proses pemberdayaan keluarga miskin. Adapun sarannya adalah pihak pengelola program perlu membangun komunikasi dan koordinasi secara sinergis dan lintas sektoral didalam mempercepat penanganan masalah sosial keluarga miskin agar lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupannya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan ini. Teriring shalawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad shalallahualaihi wassalam.

Alhamdulillah, atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa pula saya dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa selesainya penulisan TAPM ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak yang telah banyak mengorbankan waktu, tenaga dan juga ide-idenya dari mulai melaksanakan penelitian hingga akhir penulisan TAPM ini. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Suciati, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku Penyelenggara Program Pascasarjana,
4. Prof. Dr. Waspodo selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;

5. Kepala Bidang ISIP selaku Penanggung Jawab Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;
6. Almarhum/almahumah kedua orang tua saya yang telah mendidik, membimbing dan membesarkan saya serta saudara-saudara kandung saya yang selalu mendoakan saya;
7. Rekan-rekan kerja di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih khusus rekan kerja Bidang Bina Program yang selalu membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini;
8. Kepada istri dan anak-anakku tersayang yang senantiasa mendoakan dan bersabar mendampingi saya hingga penulisan TAPM ini usai.

Atas kebaikan dan ketulusan semua pihak, saya bermohon kepada Tuhan Yang Esa berkenan membalasnya terhadap apa saja yang telah mereka perbuat kepada saya. Akhir kata, saya berharap TAPM ini menghadirkan manfaat khususnya bagi kepentingan pengembangan ilmu dan pada umumnya kepada peminat semuanya.

Pangkalpinang, Oktober 2010

Penulis

N u s a t i o n



**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

NAMA : Nusation

NIM : 015535673

PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I



Prof. Dr. Waspodo
NIP. 194012191965091001

Pembimbing II



Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, MA
NIP. 194510071973021001

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP



Dra. Susanti, M.Si
NIP. 196712141993032002

Direktur Program Pascasarjana



Suciati, Ph.D
NIP. 195202131985032001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Nusation
 NIM : 015535673
 PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik
 JUDUL TAPM : Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
 Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di
 Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
 Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal :
 Waktu :
 dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Nama : Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA (.....)

Penguji Ahli :

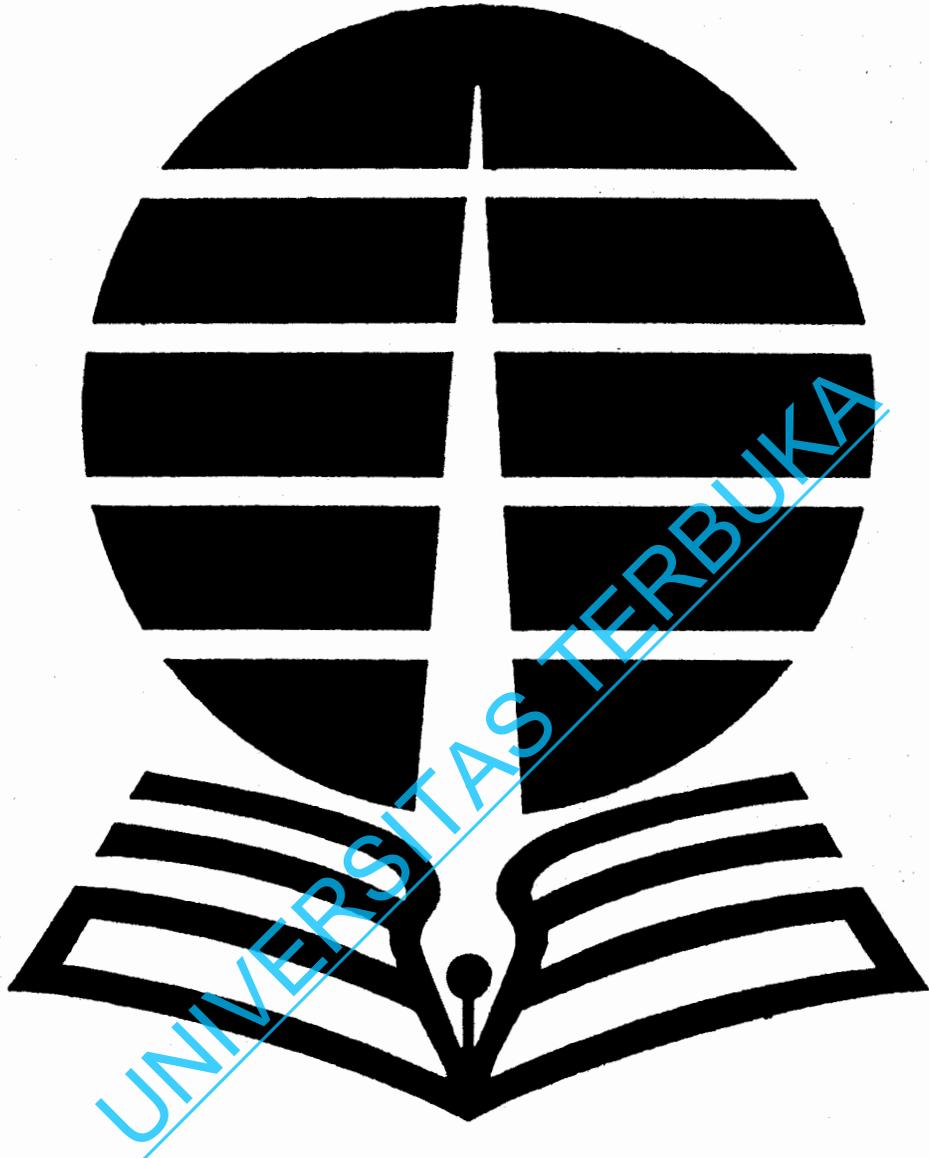
Nama : Dr. Agus Maulana (.....)

Pembimbing I :

Nama : Prof. Dr. Waspodo (.....)

Pembimbing II :

Nama : Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA (.....)



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstract	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORITIK	
A. Kajian Teoritik	13
1. Implementasi Kebijakan	13
2. Model-model Implementasi Kebijakan	15
3. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Publik	19
4. Landasan dan Mutu Implementasi	25
5. Pengertian Kesejahteraan Sosial	26
6. Konsep Pembangunan Kesejahteraan Sosial	26
7. Konsep Kebijakan Sosial	27
8. Pemahaman dan Pengertian Pemberdayaan Keluarga Miskin.....	28
9. Pengertian Keluarga Miskin	32
10. Pemahaman Konsep Pemberdayaan	35
11. Konsep Keberdayaan Keluarga Miskin	43
12. Pengertian Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	45
13. Konsep Pendampingan Sosial	47
B. Kerangka Berfikir	53
C. Definisi Konsep dan Operasional	54
1. Kemandirian	54
2. Partisipasi Sosial	54
3. Kesetiakawanan Sosial	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	56
1. Variabel Yang Diteliti	57
2. Sasaran Penelitian	58
3. Penentuan Lokasi Penelitian	58

B. Populasi dan Sampel	58
1. Populasi	58
2. Tehnik Pengambilan Sampel	59
C. Instrumen Penelitian	60
D. Prosedur Pengumpulan Data	60
1. Sumber Data	60
2. Tehnik Pengumpulan Data	61
3. Tehnik Dokumentasi	64
E. Metode Analisis Data	64
1. Model Analisis Data	65
2. Keabsahan Data	67
BAB IV TEMUAN dan PEMBAHASAN	
A. Kondisi Umum	70
B. Kondisi Permasalahan sosial	71
1. Pemberdaya Perempuan	71
2. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga	73
3. KUBE - KMM	75
4. Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga	77
5. Kondisi Nyata Tenaga Pengelola Program	84
C. Setruktur Kelembagaan	85
D. Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.....	89
1. Indikator Masukan	90
2. Indikator Proses	93
3. Indikator Keluaran	96
4. Manfaat	99
5. Dampak	101
E. Hasil Analisa Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin	102
BAB V KESIMPULAN dan SARAN	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa secara keseluruhan baik pada tataran nasional maupun di daerah. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi pembangunan kesejahteraan sosial, yakni terwujudnya keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial menuju masyarakat yang sejahtera. Visi ini mengandung makna bahwa setiap individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat Bangka Belitung memiliki hak untuk memperoleh kehidupan dan penghidupan yang baik, memperoleh pekerjaan dan penghasilan, dan memperoleh perlindungan serta jaminan kesejahteraan sosial agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara baik dan benar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Perhatian penanganan permasalahan penurunan masalah kemiskinan ini menjadi perhatian masyarakat dunia, komitmen dalam *Millenium for Development Goals* (MDGs) yang dicetuskan dalam Sidang Umum PBB tahun 2000, dikenal dengan 8 (delapan) sasaran yang diantaranya adalah menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan mengurangi setengahnya jumlah penduduk yang berpendapatan kurang US\$ 1 per hari dan mengurangi setengahnya jumlah penduduk yang menderita kelaparan. Dalam dokumen *Millenium Development Goals* (MDGs) ditekankan bahwa tahun 2015 jumlah penduduk miskin

dapat dikurangi hingga separuhnya. Bagi Indonesia, *Millenium Development Goals* (MDGs) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi *triger* sekaligus dasar rujukan untuk mempercepat pengurangan penduduk miskin, (Pidato Mensos RI, 2009).

Salah satu program prioritas dan strategis yang dilakukan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama enam tahun ke belakang dalam upaya penanganan masalah sosial adalah melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Program ini merupakan strategi penanganan masalah kesejahteraan sosial yang memiliki peran ganda, di satu sisi menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kemampuan atau kemandirian individu/keluarga/kelompok, namun pada sisi lain memiliki dampak terhadap pengurangan penduduk miskin dan rentan. Tingginya permasalahan kesejahteraan sosial sering tidak seimbang dengan anggaran kesejahteraan sosial, sedangkan perhatian pemerintah daerah dalam menangani masalah kemiskinan dan keluarga rentan nampaknya masih rendah terutama dukungan anggaran. Alokasi dana (APBN dan APBD) untuk menangani keluarga miskin rata-rata per tahun dibawah 2 (dua) milyar untuk 7 (tujuh) kabupaten/kota. Hal ini masih bisa dipahami, mengingat konsentrasi atau arah kebijakan pembangunan daerah lebih diarahkan kepada peningkatan infrastruktur pembangunan daerah.

Pemberdayaan Sosial melalui *public assistance program* yang ditujukan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan dan kerentanan yang pada umumnya dialami oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama keluarga miskin. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008 menyebutkan jumlah penduduk miskin adalah 34,96 juta orang (15,42%), dan pada tahun 2009 Pemerintah menargetkan penurunan menjadi 12% atau penurunan penduduk miskin sebesar 3,42% dari tahun 2008. Program kesejahteraan sosial tahun 2010 dapat memberikan kontribusi dalam upaya mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. (Pidato Mensos RI, 2009).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai sasaran pembangunan kesejahteraan sosial berhak untuk terus diperhatikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (PPLS 2008) diperoleh angka populasi keluarga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 31.528 RTS yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah keluarga miskin di kota Pangkalpinang terdapat 23.521 KK yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Populasi keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan sebanyak 3.889 KK. Kenyataan ini menunjukkan bahwa penanganan masalah keluarga miskin yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimulai dari tahun 2006 hingga 2009 masih rendah, jika dilihat dari jumlah pelayanan yang telah dilayani, yakni sebanyak 6.293 KK dari total populasi keluarga miskin (miskin dan hampir miskin) sebanyak 23.521

KK, sehingga tingkat permasalahan keluarga miskin di kota Pangkalpinang dikhawatirkan dampaknya semakin kompleks. Dengan demikian, diperlukan suatu komitmen dan sentuhan nyata oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara sinergis dan terpadu dalam mempercepat penanganannya.

Menurut sumber data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Depsos RI ada 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) prioritas, yakni kemiskinan, ketelantaran/kerentanan, kecacatan, ketunasosialan dan bencana. Salah satu diantaranya prioritas penanganan masalah kemiskinan adalah pemberdayaan keluarga miskin. Program penanganan masalah sosial keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang dilaksanakan melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya, dengan kegiatan pokok adalah Pemberdayaan Keluarga Miskin. Dengan adanya pola pemberdayaan keluarga miskin melalui pemberian bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP), keluarga miskin diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya sekaligus dapat memberikan penghasilan yang cukup bagi keluarganya.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 1997). Hal ini berarti adanya upaya-upaya secara sadar untuk

menyusun suatu rencana yang diikuti dengan ketersediaan program dan anggaran yang memadai sehingga tercapai pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Permasalahan sosial muncul tidak hanya akibat dari melemahnya kemampuan manusia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, justru bisa jadi faktor diluar manusia tersebut yang menyeret permasalahan sosial semakin mengembang.

Implementasi program pemberdayaan keluarga miskin sudah dilakukan sejak tahun 2002 yang dilaksanakan dengan berbagai pola pemberdayaan potensi keluarga, yakni Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Muda Mandiri (KMM), Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Sedangkan mekanisme pemberdayaannya melalui pemberian bantuan sosial secara kelompok dengan istilah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan sosial secara perorangan/individu dengan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menekankan pada kekuatan kelompok sebagai wadah dan potensi usaha yang dikembangkan, sedangkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menitikberatkan pada potensi individu selaku kepala keluarga atau pencari nafkah utama sebagai penggerak dan pelaku usaha bagi anggota keluarganya.

Program Pemberdayaan keluarga miskin diarahkan pada peningkatan dan penguatan potensi keluarga sebagai sumber sistem sosial ekonomi yang perlu dibangun dan dikembangkan secara sinergis,

terarah dan berkelanjutan. Keluarga sebagai sistem sosial yang memiliki fungsi dan peran strategis dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai kehidupan sekaligus modal sosial yang harus diperhatikan dan dipupuk sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial. Karena konsep keluarga dipandang sebagai tempat untuk memecahkan masalah keluarga (*family problem solving*). Dalam konteks itulah, mestinya pemerintah dengan serangkaian kebijakan dan programnya memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap penanganan permasalahan keluarga miskin. Sebagaimana pandangan konseptual dari David Cox (2004) bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan kemiskinan adalah faktor struktural, yaitu menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif, dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin.

Memang pemerintah maupun pemerintah daerah telah berupaya menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dengan adanya kebijakan dan program pemberdayaan keluarga terutama keluarga miskin. Penanganan masalah sosial menyangkut pemberdayaan keluarga miskin melibatkan banyak peran serta pihak lain yang memiliki hubungan dengan pemecahan atau pemberdayaan bagi keluarga. Dalam rangka mengimplementasi program pemberdayaan keluarga miskin salah satu faktor penting dan mempengaruhi adalah keterlibatan pendamping sosial sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada keluarga miskin. Fungsi dan peranan pendamping sosial selaku

mitra kerja pembangunan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat sangat membantu mempercepat jangkauan pelayanan, meningkatkan dan mengembangkan motivasi, pengetahuan, gaya hidup, sikap dan tindakan keluarga miskin memiliki arti penting ke arah perubahan sosial ekonomi menuju kepada peningkatan kualitas dan kesejahteraan kehidupan keluarga miskin.

Selain itu, pola pembinaan lanjutan dari program pemberdayaan keluarga miskin selama ini belum sampai pada sinergisitas program dengan kabupaten/kota dan keberlanjutan lintas sektor masih perlu dikembangkan secara terpadu, berkekanjutan dan tuntas. Pola penanganan masalah belum efektif dan tuntas melalui pemberian bimbingan teknis dan pelatihan keterampilan berusaha, begitu pula dengan bantuan yang diberikan sekedar untuk stimulan saja, keterlibatan dunia usaha belum dilakukan secara sinergis dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial atau lembaga sosial, manajemen pengelolaan bantuan tidak dilakukan secara terpadu, pengawasan internal masih rendah dan evaluasi capaian program belum dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan program.

Permasalahan lain yang muncul dalam pemberdayaan keluarga miskin diantaranya mekanisme bantuan sosial yang tidak diikuti dengan pemberian bimbingan teknis dan keterampilan tertentu sesuai permasalahannya. Hal ini dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan bimbingan usaha dan keterampilan usaha. Menunjuk pada dokumen pelaksanaan anggaran tidak terdapat rencana kerja untuk

bimbingan keterampilan usaha. Penanganan masalah keluarga miskin butuh sinergisitas anggaran, program dan sumber daya manusia, sehingga perlu pengkajian yang komprehensif terhadap efektifitas implementasinya, sistem dan pola bimbingan dan pendampingan sosial dalam pengelolaan usahanya. Dengan pendidikan yang kurang memadai, keluarga miskin cenderung tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan berusaha yang cukup dalam mengelola usahanya. Berdasarkan data yang ada lebih dari 60 % keluarga miskin penerima bantuan berpendidikan tamatan SD/tidak tamat SD.

Dilain sisi, kebijakan Departemen Sosial RI sejak tahun 2008 menerapkan pola konsentrasi lokasi dan sasaran, sehingga pemberdayaan keluarga miskin menjadi kurang efektif dan maksimal dalam kaitannya dengan penanganan kemiskinan secara terpadu dan tuntas. Kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin masih terus diperjuangkan dan dilakukan secara nyata dan realistis sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kondisi yang ada, dalam arti keluarga miskin memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan layak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan secara manusiawi. Dengan asumsi bahwa pola penanganan keluarga miskin tidak akan memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan keluarga miskin, jika tidak dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan serta dukungan anggaran yang memadai.

Penanganan permasalahan sosial keluarga miskin di Kecamatan Bukit Intan dilakukan dengan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif kepada keluarga miskin terutama yang memiliki keterampilan usaha. Selama ini, implementasi program pemberdayaan keluarga miskin diarahkan kepada usaha yang cepat menghasilkan dan biaya rendah serta dilakukan didalam rumah. Hal ini, dilatar belakangi oleh nilai anggaran bantuan yang tersedia hanya cukup untuk jenis usaha tertentu saja, seperti bikin jajanan/kue.

Berdasarkan hasil evaluasi program yang dilakukan oleh bidang Bina Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemukan bahwa permasalahan utamanya adalah minimnya anggaran bantuan usaha. Kenyataan ini dapat dipahami dari jumlah sasaran pelayanannya minim, nilai bantuan yang tidak maksimal, pembinaan lanjutannya belum dilakukan, dan pendampingannya pun masih setengah-setengah serta tidak dilakukannya pemberian keterampilan usaha. Semua itu tidak terlepas dari minimnya anggaran pemberdayaan keluarga miskin. Beranjak dari persoalan di atas, peneliti berasumsi bahwa penanganan keluarga miskin belum memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan dikarenakan lemahnya konsistensi pengelola program didalam mengimplementasikan panduan teknis atau pelaksanaan secara komprehensif, dinamis dan efektif. Peneliti memilih Kecamatan Bukit Intan sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi dan sumber daya

yang banyak dan baik untuk dikembangkan guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Dengan melihat dan mencermati berbagai fenomena permasalahan pemberdayaan keluarga miskin di atas, peneliti merasa tertarik untuk mendalami dan melakukan penelitian dan pengkajian mendalam terhadap implementasi program pemberdayaan keluarga miskin. Permasalahan yang ingin peneliti kaji adalah *“Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kecamatan Buki Intan Kota Pangkalpinang”*.

B. Perumusan Masalah

Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah dalam menangani permasalahan keluarga miskin, berakibat pada kurang efektif dan meratanya penanganan permasalahan keluarga miskin secara optimal. Persoalan pola pembinaan dan pendampingan usaha termasuk pengelolaan usaha belum mengarah kepada tertib administrasi dan berorientasi pengembangan pasar. Terlebih lagi diperburuk dengan tidak adanya pelatihan keterampilan atau pelatihan teknis berusaha bagi penerima pelayanan, sehingga program yang dijalankan tidak utuh dan berkesinambungan.

Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin melalui pola bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada dasarnya dapat dijalankan oleh sasaran penerima bantuan, namun disisi lain dihadapkan pada keterbatasan pengetahuan, manajemen, dan keterampilan teknis terlebih lagi minimnya anggaran pemberdayaannya, sehingga

perkembangan usahanya secara ekonomi belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan penghasilannya. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan semangat dan komitmen serta kemampuan manajerial para pendamping sosial yang melakukan proses pendampingannya kepada keluarga miskin.

Penelitian ini mencoba mengkaji Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang? dan
2. menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian tentang pemberdayaan keluarga miskin melalui program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

- a. Bahan kajian dan referensi bagi pengelola Program Pemberdayaan Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi keluarga serta upaya peningkatan kesejahteraan sosial keluarga miskin.
- b. Bahan referensi bagi peneliti atau pelaku usaha-usaha kesejahteraan sosial dalam upaya mengkaji permasalahan dan penanganan masalah yang ada secara lebih mendalam.
- c. Bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian tentang pemberdayaan keluarga miskin melalui program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat memberikan manfaat dan kontribusi teoritis, metodologis, dan empiris bagi kepentingan akademis bidang kesejahteraan sosial dan khususnya disiplin ilmu pekerjaan sosial.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Wibawa (1995) lebih dilihat dalam konteks apa yang terjadi selama fase tindakan yang mengikuti kebijakan yaitu lebih merupakan kajian yang melihat seluk beluk proses yang dinamakan "*the execution and steering of policy actions over time*".

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran (*target group*) melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang berlangsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended/negative effects*). Dengan demikian implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan *administratif*, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan.

Tujuan dari implementasi adalah mengkaji tingkat kepatuhan (*compliance*) yakni memberikan informasi mengenai bagaimana suatu kebijakan dijalankan di lapangan, menemukan konsekuensi kebijakan yakni melihat berbagai dampak yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan, menemukan berbagai bentuk kendala pelaksanaan kebijakan, baik pada aspek kelembagaan, personil, prosedur, sosial dan sebagainya.

Budi Winarno (2008:34) suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

Ripley dan Franklin (Winarno, 2007:145) menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) ini menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh

berbagai aktor, khususnya birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang.

Grindle (Winarno, 2007:146) memberikan pandangan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Proses implementasi adalah proses pelaksanaan untuk menghasilkan *output* kegiatan guna mewujudkan tujuan kebijakan, proses perubahan keputusan dari tataran ide menjadi tindakan kolektif dan konkret, proses pengendalian administrasi meliputi pelibatan inter-organisasi, koordinasi, pengerahan SDM, alokasi anggaran dsb. Isu implementasi antara lain mengapa sebuah kebijakan/program yang telah direncanakan seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, mengapa para pelaksana tidak dapat memanfaatkan sumber daya (SDM, financial, peralatan) yang tersedia secara optimal, mengapa unit/bagian pelaksana kebijakan tidak mampu mengembangkan kolaborasi dan koordinasi.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Dengan memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan diatas maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan

berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Pandangan mengenai model (teori) implementasi kebijakan banyak ditemukan dalam berbagai literatur.

Parsons (1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu : 1) *The Analysis of failure*, 2) Model Rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses, 3) Model pendekatan *Bottom-up* sebagai kritikan terhadap model pendekatan *top-down* dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi, 4) Teori-teori hasil sintesis (*hybrid theories*). Untuk keperluan penelitian ini, diambil beberapa pandangan mengenai implementasi, masing-masing pandangan mewakili tiga dari empat perkembangan model yang dikemukakan Parsons (1997) dan menurut peneliti cocok dengan tema penelitian model tersebut diantaranya yaitu:

a. Model Pendekatan Top-Down

Van Meter dan van Horn (Abdul Wahab, 1997), memandang implementasi kebijakan sebagai “*those action by public private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dalam teorinya Van Meter dan Van Horn beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Mereka menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

b. Model Pendekatan *Bottom-up*

Smith (Islamy, 2001) memandang implementasi sebagai proses atau alur, melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan. Smith mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu : (a) *idealized policy* adalah suatu pola interaksi yang diidealisasikan perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya, (b) target group yaitu bagian dari *policy stakeholders* yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena target group ini banyak mendapat pengaruh dari

kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan, (c) *implementing organization*, yaitu badan-badan.

c. Model pendekatan sintesis (*hybrid theories*)

Sabatier (lihat Parsons, 1997) mengkaji implementasi menuju suatu sintesis mengatakan bahwa tahap-tahap kebijakan (*policy-stages*) tidaklah membantu memahami proses pengambilan kebijakan, karena memilah-milahnya menjadi serangkaian bagian yang sifatnya tidak realistis dan artifisial. Karena itu dari sudut pandang ini, implementasi dan *policy – making* menjadi satu kesatuan yang sama. Sehubungan dengan hal ini, Sabatier mengemukakan bahwa sintesis dari dua posisi (*model top down dan bottom up*) tersebut dimungkinkan dengan mengambil wawasan dari Hjern dan Porter untuk dipakai pada dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk *network*, model top-down memfokuskan perhatiannya pada institusi dan kondisi sosial ekonomi yang menekankan perilaku. Sintesis ini disempurnakan melalui pemakaian konteks *policy subsystem*, yaitu semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan kebijakan. Dan dibatasi oleh parameter yang relatif stabil serta kejadian diluar *subsystem*. *Policy subsystem* adalah aktor-aktor kebijakan yang berasal dari organisasi baik organisasi publik maupun privat secara aktif mengkaji dan mengkritisi suatu masalah kebijakan tertentu. Hal penting dari

model implementasi kebijakan ini adalah kedudukannya sebagai bahan berkesinambungan dari pengambil kebijakan dalam *Acs (Advocacy Coalitions)*, atau pendampingan para aktor kebijakan dengan berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dengan kata lain *Advocacy Coalitions*, adalah aktor-aktor dari berbagai organisasi publik dan privat yang memiliki serangkaian sistem kepercayaan yang berusaha merealisasikan tujuan bersama sepanjang waktu (Islamy, 2001).

3. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal, Hoogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil manakala suatu

kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Wahab, 1997). Selain dipengaruhi oleh konteks makro kondisi ekonomi, sosial dan politik, Howlett dan Ramesh (1995) mencatat bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hakekat dan perumusan masalah kebijakan, keragaman masalah yang ditangani oleh pemerintah, ukuran kelompok-kelompok sasaran dan perubahan perilaku yang diharapkan.

Bridgeman dan Davis (2004), prasyarat bagi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

- a. Didasari teori dan kaidah-kaidah ilmiah mengenai bagaimana program atau peraturan beroperasi jika disusun kerangka konseptual yang sederhana, jelas dan teruji secara ilmiah, maka implementasi kebijakan kemungkinan besar akan berhasil.
- b. Memiliki langkah-langkah yang tidak terlalu banyak dan kompleks, semakin banyak dan kompleks langkah-langkah sebuah kebijakan, semakin besar kesulitan yang dihadapi kebijakan akibat banyaknya kesalahpahaman dan pertentangan yang timbul.
- c. Memiliki prosedur akuntabilitas yang jelas
- d. Pihak yang bertanggungjawab memberikan pelayanan harus dilibatkan dalam perumusan desain. Para birokrat ditingkat pelaksana sebaiknya memiliki informasi yang lengkap mengenai hakekat, model serta landasan filosofis mengenai

- kebijakan yang mendasari diberikannya sebuah program.
- e. Melibatkan monitoring dan evaluasi secara teratur. Pengawasan evaluasi sangat diperlukan agar implementasi berjalan efektif.
 - f. Para pembuat kebijakan harus memberi perhatian yang sungguh-sungguh hingga kebijakan tersebut telah mampu diterapkan melalui serangkaian program, yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Brigeman dan Davis (2004:37) membagi instrumen implementasi kebijakan dalam dua kelompok, yakni instrumen yang berkaitan dengan tindakan paksaan (*coercive forms of action*) dan tindakan tanpa paksaan (*non-coercive forms of action*).

Instrumen yang berkaitan dengan tindakan paksaan, meliputi:

- a. Legislasi dan regulasi. Hukum dan perundang-undangan dapat dijadikan instrumen untuk mendukung agar kebijakan dapat diterapkan.
- b. Petunjuk administrasi. Juklak dan juknis dapat memberi petunjuk petugas pelaksana untuk menjalankan program.
- c. Pelaporan. Persyaratan wajib yang diberikan kepada pihak-pihak pelaksana kebijakan untuk melaporkan aspek-aspek operasional dan keberhasilan tugasnya mengimplementasikan program.
- d. Pemajakan. Pajak dapat dijadikan alat atau insentif yang ampuh dalam memaksa orang atau lembaga melaksanakan suatu kegiatan

Instrumen yang berkaitan dengan tindakan tanpa paksaan, mencakup:

- a. Komunikasi. Brosur, iklan, *press release*, pertemuan-pertemuan publik, pelatihan, staf, dan instruksi tertulis merupakan alat-alat yang dapat mengkomunikasikan kebijakan kepada individu-individu atau lembaga-lembaga yang terkena kebijakan
- b. Kontrak. Persetujuan legal untuk mengatur dan menetapkan pihak swasta menjalankan program pemerintah
- c. Pengeluaran. Belanja pemerintah yang berupa barang-barang, jasa, pelayanan, tanah dan fasilitas lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
- d. Pengawasan. Pengawasan dan pengujian terhadap produk atau hasil-hasil disesuaikan dengan standar formal yang ditetapkan
- e. Pinjaman, subsidi dan tunjangan. Instrumen ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada individu maupun lembaga agar dapat melaksanakan suatu program.
- f. Operasi pasar. Dilihat dari stabilitas sisi penawaran dan permintaan (*supply and demand*).
- g. Pemberian pelayanan. Pemberian pelayanan yang diberikan pemerintah kepada warganya, biasanya disertai kriteria kelayakan sesuai dengan hak-hak warga negara memperoleh pelayanan publik.

Implementasi kebijakan dapat juga digagalkan oleh beberapa faktor penghambat. Aspek-aspek ini biasa disebut sebagai jebakan implementasi kebijakan (*implementation trap of policy*).

Agar implementasi berjalan disarankan agar menghindari jebakan sebagai berikut :

- a. Spesifikasi yang tidak lengkap. Kebijakan yang tidak memiliki atribut dan instrumen yang lengkap akan menuai kegagalan dalam pengimplementasi
- b. Lembaga yang tidak tepat. Kebijakan yang baik belum tentu berjalan baik jika dilaksanakan oleh lembaga yang tidak tepat.
- c. Konflik tujuan. Kebijakan kadang memiliki tujuan yang berlawanan.
- d. Kegagalan insentif. Kebijakan tanpa insentif seringkali diabaikan.
- e. Konflik petunjuk. Instruksi yang tidak jelas dan berlawanan satu sama lain dapat membingungkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan sebuah program.
- f. Kurang kompetensi. Pelaksana perlu kompeten dengan jenis program yang diterapkan.
- g. Sumberdaya tidak memadai.
- h. Kegagalan komunikasi. Banyak kebijakan tergantung pada adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga pelaksana komunikasi dengan para penerima layanan.

Hogwood dan Gunn (lihat Hill, 1993) menyatakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan kondisi atau persyaratan sebagai berikut : 1) kondisi eksternal gangguan/ kendala yang serius,

2) untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai, 3) perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, 4) kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal, 5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, 6) hubungan saling ketergantungan harus kecil, 7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, 8) tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, 9) komunikasi dari koordinasi yang sempurna, 10) pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

Menurut Saul Katz (Abidin, 2006:45-46) faktor-faktor pendukung kebijakan dalam dunia usaha biasa disebut masukan atau *inputs*, dan dalam manajemen perusahaan biasa disebut dengan 6M : *men, money, material, machine, method, and market*. Dari sisi manajemen publik istilah 6 M kurang cocok faktor pendukung (*supporting factors*) adalah *human resources, finance, logistic, information, participation, and legitimation*. Untuk *men* melalui jenjang kepankahan dan karier *human resources* bukan *outsourcing*. *Money* melalui persetujuan DPR sebagai anggaran atau *budget*. *Machine* adalah informasi, tanpa informasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa mendapat persetujuan dari atasan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada tidak boleh ada suatu kegiatan dalam pemerintahan. Suatu kebijakan tidak boleh tidak boleh

bertentangan dengan kebijakan yang di atasnya. Penafsiran yang terlalu luas dari ketentuan ini mengakibatkan administrasi pemerintahan atau birokrasi menjadi kaku. *Inputs* dalam manajemen publik adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan.

4. Landasan dan Mutu Implementasi

Menurut Islamy (2001) untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik, maka ada seperangkat kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Apakah strategi /pendekatan implementasi telah didefinisikan, dipilih dan diuruskan dengan jelas?
- b. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan?
- c. Apakah aktor-aktor utama (*policy subsystems*) telah ditetapkan dan siap menerima tanggungjawab pelaksanaan kebijakan tersebut? Apakah prinsip " *deliver mix* " telah dilaksanakan?
- d. Apakah prosedur operasi baku telah ada, jelas dan difahami oleh pelaksana kebijakan?
- e. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik?
- f. Bagaimana, kapan dan kepada siapa alokasi sumber-sumber hendak dilaksanakan?
- g. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggungjawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan?
- h. Apakah pelaksana kebijakan telah dikaitkan dengan rencana tujuan dan sarana kebijakan?
- i. Apakah kritik pengukuran dan kriteria penilaian pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas dan diterapkan dengan baik?
- j. Apakah penilaian kriteria kebijakan telah menerapkan prinsip-prinsip efisiensi ekonomi serta sosial? Koalisi aktor dalam implementasi efisiensi kebijakan dalam konteks ini adalah persatuan/kesatuan (orang/organisasi /badan) yang berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan?.

5. Konsep Kesejahteraan Sosial

Pengertian Kesejahteraan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketenteraman lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan mejunjung tinggi hak-hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.”

Pengertian di atas mengandung pokok-pokok pikiran bahwa konsepsi kesejahteraan sosial merujuk pada :

- Kondisi statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial;
- Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis di atas;
- Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan atau pelayanan sosial.

6. Konsep Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Model pembangunan sosial menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marjinal, yakni peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki

kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. (Hardiman dan Midley dalam Suharto, 1995 : 5).

Tujuan tersebut dapat dilakukan melalui menumbuhkembangkan potensi diri dan sekaligus menyediakan serta memberi pelayanan sosial khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka meningkatkan produktifitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakatnya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pengertian tersebut mengandung pokok-pokok pikiran bahwa tujuan pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan fokus utama kelompok yang kurang beruntung atau warga masyarakat yang mengalami masalah sosial (Suharto, 2008:35).

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam upayanya menitikberatkan kepada keberfungsian sosial (*social functioning*) manusia dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

7. Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah. Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. (Magil dalam Suharto, 2008:10).

Lebih tegas lagi dikemukakan oleh Bessant, Watts, Dalton, dan Smith 2006:4) bahwa kebijakan sosial adalah:

'In short, social policy refers to what governments do when they attempt to improve the quality of people's live by providing a range of income support, community services and support programs.'

Artinya secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), dan pengembangan. Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya (Suharto, 2006).

8. Pemahaman dan Pengertian Pemberdayaan dan Keluarga Miskin

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan

Depsos, 2002:3). Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 2002:4).

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2001). Sedang orang miskin adalah orang yang mempunyai kemampuan dan mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos,2001).

Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan), (b) sumber keuangan

(pekerjaan, kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial), (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk., 2004:6).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 penanganan masalah kemiskinan dimuat dalam satu bab, yaitu Bab VI tentang Penanggulangan kemiskinan. Pada pasal 19 dijelaskan bahwa pengertian penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia.

b. Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang berwayuh wajah. David Cox (2004:1-6) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi, yakni *pertama*, kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. *Kedua*, Kemiskinan yang berkaitan dengan

pembangunan. Kemiskinan subsistem (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan). Ketiga, kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. *Keempat*, kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Menurut SMERU (2001), kemiskinan memiliki berbagai dimensi, yaitu:

- 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
- 2) tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
- 3) tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga);
- 4) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal;
- 5) rendahnya kualitas SDM dan keterbatasan sumber alam;
- 6) tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat;
- 7) tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- 8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- 9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil) (Suharto, dkk, 2004:7-8).

9. Pengertian Keluarga Miskin

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Pengertian Keluarga Miskin menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga Depsos RI (2002), adalah keluarga yang berpenghasilan rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai dan rentan terhadap masalah sosial lainnya. Agar pemahaman terhadap pengertian keluarga miskin lebih operasional, dan memiliki kaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin itu sendiri pengertian keluarga rentan memiliki makna serupa layak untuk dijadikan rujukan.

a. Kategori Keluarga Miskin

Pada dasarnya keluarga miskin termasuk kategori keluarga rentan, yaitu keluarga yang berada pada ambang batas kemiskinan. Keluarga rentan adalah keluarga yang berkategori memiliki potensi masalah, namun jika tidak berdayakan akan mengalami masalah tertentu. Keluarga tersebut berada pada ambang batas marjinal dan menjadi rentan terhadap masalah lainnya (Depsos, RI. 2007).

b. Indikator Keluarga Miskin

Pemahaman mengenal keluarga miskin dalam konsep pemberdayaan berkaitan dengan konsep keluarga rentan dengan ciri-ciri atau indikator sebagai berikut:

- 1) Kemampuan sosial ekonominya berada pada ambang batas marginal dengan tingkat kebutuhan fisik minimal di atas 5-10% (kebutuhan konsumsi diatas setara dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan bahan bakar). Pendekatan kemampuan dasar melihat kerentanan sebagai keterbatasan seseorang dan keluarganya untuk menjalankan fungsi minimal dalam lingkungan masyarakatnya;
- 2) Pekerjaan tidak tetap atau punya pekerjaan tetap tetapi tidak membutuhkan keterampilan khusus;
- 3) Hubungan sosial antar/inter keluarga mengandung potensi masalah;
- 4) Mampu mengakses sumber-sumber pelayanan kesehatan terdekat seperti Puskesmas;
- 5) Rumah berlantai semen dan beratap dibawah standar lokal;
- 6) Bertempat tinggal di lingkungan yang kurang menguntungkan.

c. Yang Termasuk Keluarga Miskin

Merujuk pada pedoman operasional program pemberdayaan peran keluarga Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Sosial Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga Depsos RI, (2007) bahwa yang termasuk dalam golongan keluarga miskin adalah:

- 1) Keluarga Muda Rentan, yaitu keluarga yang baru menikah dengan usia perkawinan antara 0 – 5 tahun dan memiliki keterbatasan kemampuan sosial ekonomi, sehingga berpotensi bermasalah;
- 2) Keluarga Dewasa Rentan, yaitu keluarga yang usia perkawinannya diatas 5 tahun dan memiliki keterbatasan kemampuan sosial ekonomi, sehingga berpotensi bermasalah;
- 3) Keluarga Rentan Masalah, yaitu keluarga yang memiliki potensial masalah akibat kerapuhan pada usia perkawinan, seperti tidak bekerja, perselingkuhan, penyimpangan seksual, tindak kekerasan, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya dan lain-lain;
- 4) Keluarga di lingkungan sosial kurang menguntungkan, yaitu keluarga potensi rawan masalah sosial yang tinggal di daerah-daerah kurang mendukung tumbuh kembang terhadap anggota keluarga, seperti keluarga di lingkungan kantong-kantong kemiskinan, daerah kritis, daerah kumuh, lingkungan rentan, sekitar lokasi pelacuran, kriminalitas tinggi, dan sebagainya.

10. Pemahaman Konsep Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang dikembangkan disuatu negara (Pranarka dan Vidhyandika, 1996). Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idil manusia dan kemanusiaan (humanisme). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme, dan personalisme yang menolak segala bentuk power yang bermuara hanya pada proses dehumanisme eksistensi manusia. Demikian juga, aliran neo-marxis, freudianisme, sosiologi kritik, yang menolak industrialisasi, kapitalisme, dan teknologi. Mereka beralasan bahwa ketiga hal diatas dapat mematikan manusia dan kemanusiaan. Aliran-aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh adanya struktur sosial yang

berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (powerful). Dengan pengertian lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan. Hal ini yang oleh Schumacker disebut pemberdayaan (Thomas, 1992).

Pemberdayaan akan menjadi masalah bila secara konseptual bersifat zero-sum, maksudnya, proses pemberdayaan itu dibarengi oleh adanya power kelompok terhadap kelompok lainnya. Weber mendefinisikan *power* sebagai kemampuan seseorang/individu /kelompok untuk mewujudkan keinginannya, kendatipun terpaksa menentang yang lainnya. Jika keadaan seperti itu, istilah pemberdayaan yang disamakan dengan power harus dinegosiasikan sebagai strategi untuk mengadakan reformasi sosial (Craig dan Mayo, 1995). Craig dan Mayo (1995) menyatakan bahwa perspektif Marxis terhadap power dalam masyarakat kapitalis tidak dapat dipisahkan dari kekuatan ekonomi. Power ini bersinggungan erat dengan kepentingan kapitalis lewat kerjasama transnasional yang berskala global.

Dalam keadaan semacam itu, pemberdayaan masyarakat miskin dibatasi oleh gerakan-gerakan kapitalis. Karena itu, masyarakat miskin dan sangat miskin harus diberdayakan untuk dapat berpartisipasi lebih efektif dalam proyek dan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.

Kemampuan tawar-menawar (*bargaining position*) dan pelayanan terhadap masyarakat miskin pun semakin meningkat. Namun demikian, keadaan ini tidak terlepas dari masalah untung rugi dalam pasar global. Perspektif Marxis terhadap *power of ideas* adalah proses *setting* ideologi dan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Gramsci untuk menganalisis kerangka kerja ekonomi dan kekuatan politik. Keduanya dimanfaatkan sebagai alat legitimasi dan *contestable* yang efektif dalam masyarakat kapitalis. Hal tersebut merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi, politik, dan transformasi sosial (Craig dan Mayo, 1995).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, Mc Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan

melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, Mc Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo,1995). Sebaiknya, orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Konsep pemberdayaan kemunculannya di dasari oleh gagasan yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. Payne sebagaimana dikutip Adi (2001:32), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Berdasarkan pandangan Payne tersebut, terdapat pemahaman bahwa pemberdayaan merupakan proses pertolongan kepada klien agar mempunyai kemampuan untuk pengambilan keputusan dan pilihan-pilihan yang selaras dengan kehidupannya. Hasenfeld dalam DuBois dan Miley (1992: 227) memberikan batasan pemberdayaan sebagai berikut:

“Empowerment is a process through which client obtain resources-personal, organizational, community - then enable them to gain greater control over their environment and to obtain their aspirations”

Pemberdayaan adalah suatu proses melalui mana klien mencapai sumber-personal, organisasi, komunikasi yang memungkinkan mereka memperoleh pengendalian yang lebih besar atas lingkungan mereka dan mencapai aspirasi-aspirasi mereka. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang memberikan peluang bagi klien untuk dapat mengungkapkan aspirasi mereka, memperoleh sumber baik individu, organisasi, maupun komunitas. Ife (1995:182) menjelaskan bahwa:

"empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge and skill to increase their capacity to determine their own future and to participate in and affect the life of their community."

Pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka

sehingga dapat menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka.

Ife (1995:183) mengemukakan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk membawa masyarakat yang tidak beruntung kepada masyarakat yang lebih adil dan akan memperkuat anggota komunitas lokal sebagai komunitas serta berupaya mewujudkan komunitas dengan berbasis struktur yang efektif.

Pemberdayaan dilaksanakan dengan bertolak dari situasi ketidakberdayaan yang dialami oleh klien baik secara perseorangan, kelompok maupun komunitas. Ketidakberdayaan sebagaimana dikemukakan Keiffer dan Torre yang dikutip oleh Suharto (1997:1-34) pada umumnya dialami oleh kelompok masyarakat karena kondisi fisik maupun faktor-faktor tertentu sehingga mereka terpaksa tidak berkemampuan dan berkesempatan untuk menentukan apa yang ada pada dirinya. Ife (1995) membagi kelompok-kelompok yang tidak berdaya/beruntung kedalam tiga kelompok sebagai berikut:

- 1) Kelompok lemah secara struktur (*primary structural disadvantaged groups*), yaitu mereka yang tidak beruntung akibat tekanan-tekanan struktural terutama terkait dengan kelas; gender dan etnis yang meliputi orang miskin, penganggur, wanita, masyarakat lokal dan kelompok minoritas.

- 2) Kelompok lemah khusus (*other disadvantaged groups*), yaitu manula, anak dan remaja, penyandang cacat (fisik, mental), gay, lesbian, suku terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal (*the personally disadvantaged*), menjadi tidak beruntung, sebagai hasil dari siklus personal yang meliputi mereka yang mengalami masalah pribadi, keluarga, dan kesedihan krisis identitas.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56). Setiap upaya penanganan masalah melalui strategi pemberdayaan pada prinsipnya membangun kekuatan dan kemampuan orang yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii). Bagaimana pengambil keputusan dalam menempatkan program dan anggaran bagi orang-orang lemah sehingga mampu menciptakan keseimbangan pada struktur kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil.

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984:3). Setiap individu, keluarga, komunitas dan masyarakat berhak untuk hidup, mengembangkan potensi, memperoleh sumber kehidupan, dan dilayani dengan manusiawi. Pemerintah berkewajiban memberikan

pelayanan dan perlindungan dalam rangka memberdayakan kemampuan mereka sehingga menjadi orang-orang berfungsi.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Selanjutnya secara operasional pengertian pemberdayaan dipertegas lagi sebagai suatu upaya penguatan dan peningkatan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya. Selain itu, untuk melengkapi dan memperjelas konsep pemberdayaan, digunakan tinjauan kondisi keberdayaan keluarga miskin dalam konsep kemampuan dan keberfungsian, dan peranan pendamping sosial.

11. Konsep Keberdayaan Keluarga Miskin

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah

- ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
 - c. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
 - d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha.
 - e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
 - f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
 - g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
 - h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi, jika ia

memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan didalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), & 'kekuasaan dengan' (*power with*).

12. Pengertian Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

a. Pengertian Usaha Mikro

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan pengertian dan batasan Usaha Mikro adalah **usaha produktif** milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Ciri-Ciri Usaha Mikro

Ditinjau berdasarkan aspek permodalannya, Usaha Mikro berbeda dengan Usaha Kecil maupun Usaha Menengah. Adapun ciri-ciri Usaha Mikro menurut Tanjung (2008) adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

c. Contoh Usaha Mikro

Untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha mikro, berikut ini ada beberapa contoh Usaha Mikro, antara lain:

- usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya;
- industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat;
- usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar;
- peternakan ayam, itik dan perikanan;
- usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi) dll.

13. Konsep Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerja sosial, yakni ”membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri (*to help people help themselves*)”. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping. Masyarakat miskin yang

dibantu seringkali merupakan kelompok/individu yang tidak berdaya baik karena hambatan-hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka (Suharto, 2009:94).

Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya.

- **Fasilitator.** Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran ini antara lain menjadi model, melakukan mediasi dan negosiasi, memberi dukungan, membangun konsensus bersama, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.
- **Pendidik.** Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan

bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik.

- **Perwakilan masyarakat.** Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja.
- **Peran-peran teknis.** Mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan’ yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti, melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana.

Merujuk pada Payne (1986:26), prinsip utama pendampingan sosial adalah ”*making the best of the client resources*”. Pekerja sosial tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Bagian dari

pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan membantu klien memanfaatkan hal itu.

“whatever a social worker tries to help someone, he or she is starting from a position in which there are some useful, positive think in the client’s life and surroundings which will help them move forward, as well as the problem or block which they are trying to over come. Part of social work is finding in the good things, and help the client to take advantage of them”.
(Payne dalam Suharto, 2009:94)

Mengacu pada Parson, Jorgensen dan Hernandes (1994), ada beberapa peran pekerja sosial dalam pembimbingan sosial. Peran-peran ini sangat relevan wajib diketahui oleh pekerja sosial dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu:

a. Fasilitator/Pemungkin (enabler), Tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah:

- 1) mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) mendefinisikan tujuan keterlibatan;
- 3) mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan;
- 4) memfasilitasi keterkaitan dan kualitas sinergi sebuah sistem : menemukan kesamaan dan perbedaan;
- 5) memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan;
- 6) memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif;
- 7) mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan;
- 8) memfasilitasi penetapan tujuan;
- 9) merancang solusi-solusi alternatif;
- 10) mendorong pelaksanaan tugas;
- 11) memelihara relasi sistem;

12) memecahkan konflik.

b. Broker, dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker, yaitu:

- 1) mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat;
- 2) mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten;
- 3) mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

Dalam melaksanakan peran sebagai broker, ada dua pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pekerja sosial, yaitu:

- 1) pengetahuan dan keterampilan melakukan asesmen kebutuhan masyarakat (community needs assessment), yang meliputi : (a) jenis dan tipe kebutuhan, (b) distribusi kebutuhan, (c) kebutuhan akan pelayanan, (d) pola-pola penggunaan pelayanan, dan (e) hambatan-hambatan dalam menjangkau pelayanan;
- 2) pengetahuan dan keterampilan membangun konsorsium dan jaringan antar organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk : (a) memperjelas kebijakan-kebijakan setiap lembaga, (b) mendefinisikan peranan lembaga-lembaga, (c) mendefinisikan potensi dan hambatan setiap lembaga, (d) memilih metode guna menentukan partisipasi setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur guna menghindari duplikasi pelayanan, dan (f) mengembangkan prosedur guna mendefinisikan dan memenuhi kekurangan pelayanan sosial

c. Mediator, Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongan.

Compton dan Galaway (1989:511) memberikan beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- 1) mencari persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik;
- 2) membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain;
- 3) membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama;
- 4) menghindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah;
- 5) berupaya untuk melokalisasi konflik ke dalam isu, waktu dan tempat yang spesifik;
- 6) membagi konflik kedalam beberapa isu;
- 7) membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik;
- 8) memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain;
- 9) menggunakan prosedur-prosedur persuasi.

d. Pembela, Rothblatt (1978) memberikan beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela dalam pendampingan sosial:

- 1) keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar;
- 2) keterwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan;
- 3) keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan;
- 4) pengurangan permusuhan: mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan;
- 5) konfirmasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis;
- 6) pendukung: mendukung partisipasi secara luas;
- 7) kepekaan: mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan

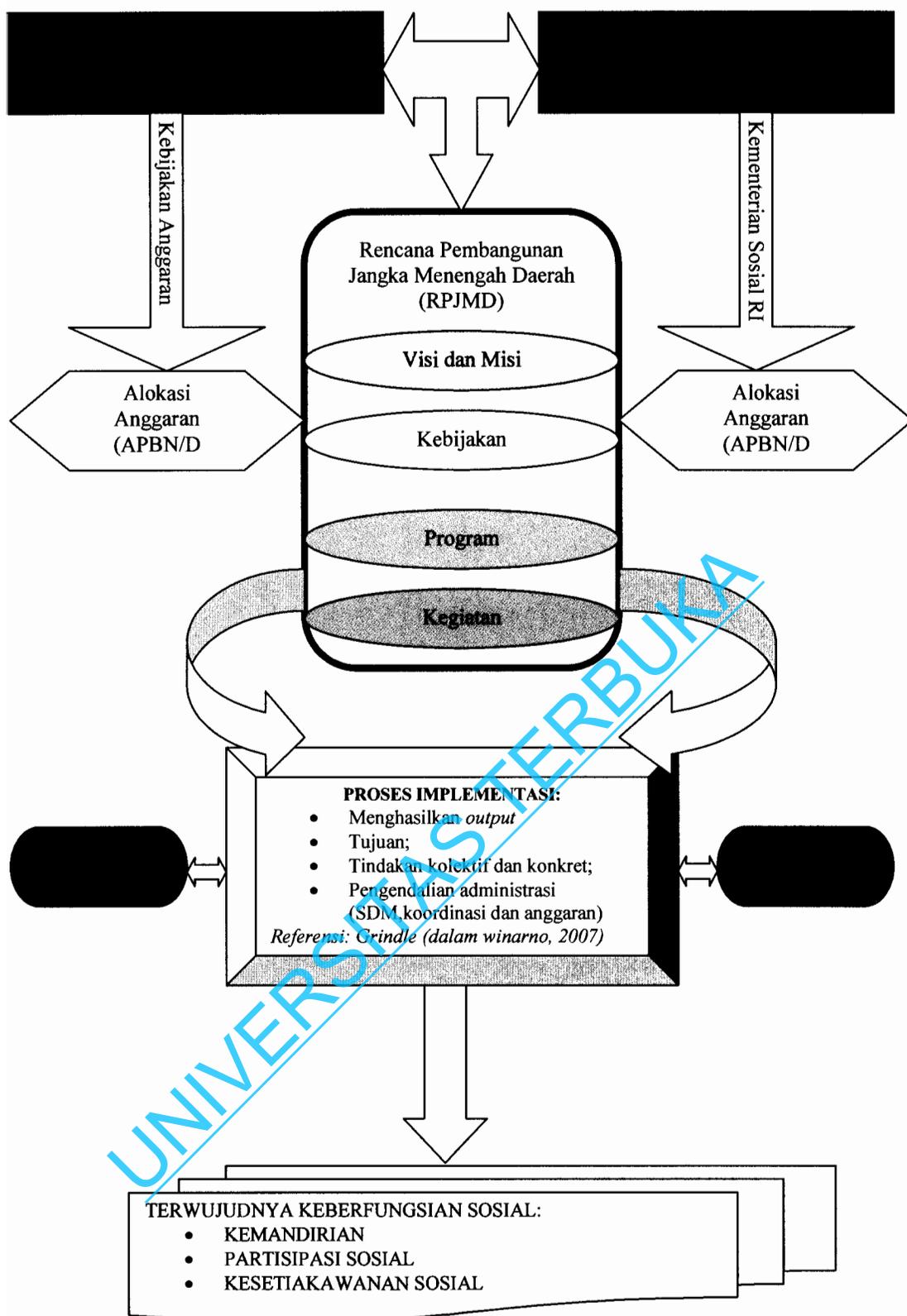
dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

5. Pelindung, peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

- 1) menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama;
- 2) menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan;
- 3) mengkomunikasikan dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai tanggung jawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Kerangka Berpikir



C. Definisi Operasional

1. Kemandirian merupakan suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain (Lamman dkk, 1988). Hal senada juga diungkapkan oleh Brawer (1973) bahwa kemandirian merupakan perilaku yang terdapat pada seseorang yang timbul karena dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena pengaruh dari orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemandirian itu merupakan kondisi atau keadaan dimana keluarga miskin memiliki kemampuan berusaha dan bersikap serta dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas kehidupannya sehingga mampu untuk mengatur dirinya dan keluarganya serta tidak tergantung lagi kepada bantuan pemerintah atau orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ciri-ciri dari sikap dan kondisi mandiri yang diharapkan terjadi perubahan pada keluarga miskin, yakni mampu mengambil inisiatif, mampu mengatasi masalah, penuh ketekunan, muncul rasa percaya diri, memperoleh kepuasan dari usahanya, terus berusaha menjalankan usahanya tanpa bantuan orang lain;
2. Partisipasi sosial menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut pandangan Achmad

Wazir., et al. (1999:29) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan demikian, partisipasi sosial dapat dikatakan bahwa suatu usaha atau perilaku secara sadar dari seseorang atau masyarakat untuk melibatkan diri dan berkontribusi secara sukarela dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat guna mencari alternatif pemecahan masalah keluarga miskin disekitarnya termasuk dalam proses pelaksanaan dan mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun Hal yang diinginkan dari adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan keluarga miskin (pemberdayaan) secara langsung dalam program pemberdayaan keluarga miskin itu sendiri;

3. Kesetiakawanan sosial merupakan Kesetiakawanan sosial merupakan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan modal sosial yang ada dalam masyarakat harus terus digali. Semangat kesetiakawanan sosial harus berkembang dan didayagunakan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera (Depsos RI, 2009). Jadi, kesetiakawanan sosial suatu bentuk dari adanya rasa solidaritas sosial dengan tumbuhnya sikap dan perilaku saling mengerti, memahami dan mau berbagi antara sesama terutama lebih peduli dan memperhatikan nasib orang-orang kurang berdaya dilingkungan kehidupan sosialnya.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan kepada gejala, fakta atau informasi sosial. Penelitian ini dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen menurut Moleong (2005). Format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat (Bungin, 2007:69). Dikatakan demikian karena pendekatan kualitatif pada penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain mempunyai *setting* yang aktual, penelitian adalah instrumen kunci. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui informan kunci (*key informan*) dan analisis data sekunder. *Informan* adalah orang yang memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai data yang diperlukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Data bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan pemaknaan tiap kejadian adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1998).

Penelitian kualitatif menurut (Dimiyati, 1997) adalah peristiwa sosial selain itu karena dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa riil di lapangan, juga dapat mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi

(*hidden value*). Lebih peka terhadap informal-informal yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

Lofland dan Losland (Moleong, 2000) berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan, bisa juga berupa data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.

Pendekatan kualitatif menurut Saifuddin Azwar (1998) adalah pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

1. Variabel Yang Diteliti

Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

- a. Variabel Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Langkah-langkah implementasinya mengacu petunjuk teknis pemberdayaan keluarga miskin.
- b. Variabel Faktor-faktor kendala implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang.

2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah pengelola program pemberdayaan keluarga miskin dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang

langsung berkaitan dengan pelaksanaan program ini, yaitu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana/Pengelola Program, Petugas Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, Pendamping Sosial, dan keluarga miskin penerima bantuan usaha ekonomi produktif.

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu lokasi penerima program pemberdayaan keluarga miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yaitu apakah merupakan individu, kelompok, organisasi, dsb. Menurut Hadari Nawawi (2004). Populasi adalah:

"Keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai-nilai test, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian"

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) melalui program pemberdayaan keluarga miskin yang tersebar di kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang sebanyak 62 KK/orang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006:61). Berkaitan dengan implementasi program, maka informan yang dipilih adalah pengelola program dan *stakeholders* yang dijadikan sumber pengumpulan data dan pengetahuan permasalahan penelitian yang akan dikaji. Dalam pengambilan sampel ditetapkan 4 (empat) kelurahan di kecamatan Bukit Intan yang pernah menerima bantuan untuk mewakili sampel penelitian.

Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi untuk mencari informan baru, proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini, jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi bisa juga banyak, terutama tergantung dari: a) tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan b) kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti (Bungin, 2008:53).

Memfokuskan pada penelitian Program Pemberdayaan Keluarga Miskin. Informan yang dapat mewakili sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengelola Program: Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung dan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pemberdayaan Sosial

- b. Pelaksana Pengelola Program: Kepala Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga
- c. Pejabat struktural di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Kepala Bidang Bina Program, Kepala Seksi Perencanaan Program dan Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Laporan.
- d. Terkait dengan pelaksanaan program. Petugas Pelaksana Lapangan (staf teknis kegiatan), petugas Pendamping Sosial (Petugas Dinas Sosial Kota dan Pekerja Sosial Masyarakat), dan Keluarga Miskin.

C. Instrumen Penelitian

Proses pelaksanaan penelitian di lapangan diperlukan instrumen penelitian yang memuat berbagai pertanyaan substansi yang mengacu pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Instrumen yang disusun berupa daftar pertanyaan yang ditujukan kepada subjek penelitian.

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari informan di lapangan yang mengetahui tentang Implementasi Program Pemberdayaan

Keluarga Miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang melalui kegiatan wawancara maupun dari pengamatan langsung di lapangan maupun instansi terkait.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari instansi-instansi terkait, laporan-laporan studi terdahulu dan lain-lain. Antara lain meliputi berbagai jenis data fisik, data sasaran pelayanan, dan data hasil pelaksanaan program. Tempat dan peristiwa yaitu berbagai peristiwa atau kejadian situasi sosial yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian yang akan diobservasi, antara lain lingkungan fisik dan sosial keluarga miskin penerima bantuan, Fokus penelitiannya adalah pandangan pejabat pengelola program, pelaksana program, pejabat struktural, dan *stakeholders*.

2. Teknik Pengumpulan Data

Lofland dan Lofland (Moleong, 2005) menegaskan bahwa dalam rangka pengumpulan data proses penelitian kualitatif ada tiga kegiatan yaitu proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*) dan tahap pengumpulan data (*logging the data*).

Pada tahap memasuki lokasi penelitian (*getting in*), peneliti menunjukkan surat izin resmi sebagai bukti peneliti bahwa akan mengadakan suatu penelitian dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peneliti berusaha

menciptakan hubungan yang simpatik dan bersahabat dengan informan guna meyakinkan kepada informan bahwa peneliti akan meminta bantuannya dalam memperoleh masukan atau data tertentu, sehingga diharapkan peneliti dapat diterima oleh informan dengan baik. Langkah selanjutnya, peneliti berusaha menjalin hubungan secara pribadi yang lebih akrab dengan sasaran penelitian, mencari informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan berupaya menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.

Pada tahap pengumpulan data (*Logging the data*), peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi non partisipan.

Merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas sesuai dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara yang digunakan adalah wawancara secara mendalam, tanya jawab dilakukan secara bebas namun terarah. Menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di lapangan, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait.

Sebelum melakukan proses wawancara dipersiapkan dulu bahan yang menjadi topik permasalahan dalam wawancara,

dengan terlebih dahulu mempelajari dan menganalisa berbagai data dan laporan terdahulu terkait dengan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

b. Observasi lapangan dan partisipan

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian mulai dari kegiatan pengumpulan data yang formal hingga kausal dan melakukan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan cara; peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data dan mencatat segala informasi serta hal-hal yang relevan dengan masalah penelitian dengan kedudukan peneliti tidak secara langsung menjadi bagian dari kehidupan yang diteliti.

Pengamatan ini dilakukan di lokasi penerima bantuan dan atau tempat usaha/rumah tempat tinggal penerima bantuan

Dalam survai lapangan ini diharapkan mendapatkan data informasi menyangkut:

- Gambaran kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga miskin penerima bantuan
- Gambaran tentang lingkungan sosial di sekitar kehidupan keluarga miskin

- Gambaran tentang faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan implementasi dan juga kegagalan implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Teknik ini merupakan teknik mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen yang tersedia dan berguna untuk menunjang pengumpulan data meliputi laporan resmi, bahan pustaka yang dapat dijadikan referensi penunjang proses penelitian.

Dokumen tersebut antara lain laporan-laporan terdahulu seperti laporan tahunan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Undang-undang, studi pustaka, literatur, kajian, syarat-syarat dan petunjuk operasional kegiatan serta foto-foto dokumentasi yang berkaitan dengan Program Pemberdayaan Keluarga Miskin.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengorganisasikan data kedalam susunan-susunan tertentu dalam rangka penginterpretasikan data, kemudian ditabulasi, sesuai dengan susunan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian, dan juga melakukan penghitungan-penghitungan tertentu sesuai dengan jenis pengolahan statistik yang digunakan dimasing-masing masalah dan/atau hipotesis penelitian, dan pada akhirnya

diinterpretasikan atau disimpulkan, baik untuk masing-masing masalah atau hipotesis penelitian maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.

Analisis dilakukan untuk menemukan pola, caranya dengan melakukan pengujian sistematis untuk menetapkan bagian-bagian hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya antara teori dari kajian pustaka dan kenyataan di lapangan. Untuk dapat menemukan pola tersebut dilakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Peneliti akan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Proses analisis data ini peneliti lakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dilakukan.

1. Model Analisis Data

Menurut *Miles* dan *Huberman* (Bungin, 2001) ada tiga komponen yang benar-benar harus diperhatikan dalam melakukan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif tersebut, yaitu: *data reduction*, *display data*, *conclusion drawing verification*.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan suatu langkah untuk memisahkan hal-hal yang penting dan tidak penting dari data-data yang terkumpul, sehingga nantinya data-data tersebut menjadi lebih fokus terhadap tujuan penelitian.

Pada tahap ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung

b. *Display data* (penyajian data)

Sajian data merupakan langkah yang dilakukan dengan membuat perencanaan kolom dalam bentuk matriks gambar (skema) dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.

c. *Conclusion drawing verifikasi* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah seluruh proses analisis data telah selesai dilakukan, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang tepat dari hasil penelitian yang dilakukan.

Dilakukan secara terus menerus sepanjang pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat *tentatif*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*grounded*". Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

2. Keabsahan data

Moleong (2000) dan Nasution (1990) mengemukakan bahwa ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu *credibility, transferability, dependability, confirmability*. Untuk memeriksa keabsahan data hasil penelitian ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

a. *Credibility*

Penerapan konsep kriteria derajat kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan *inquiry* sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti dengan jalan: memperpanjang masa observasi, melakukan *peer debriefing* (hasil kajian didiskusikan dengan orang lain agar memperoleh kritik dan saran), *triangulasi* (untuk mengecek kebenaran), *member check* (mengecek ulang garis besar berbagai hal yang telah disampaikan informan).

Triangulasi adalah tehnik pemeriksanaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000:178). Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi metode atau cara pengumpulan data ganda yang antara lain berupa pengamatan, wawancara dan analisis dokumen. Untuk memperoleh data dilakukan pengamatan dan wawancara dengan para informan sesuai rumusan masalah penelitian. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh.

Tehnik pemeriksanaan keabsahan data penelitian ini selain menggunakan triangulasi metode juga triangulasi sumber.

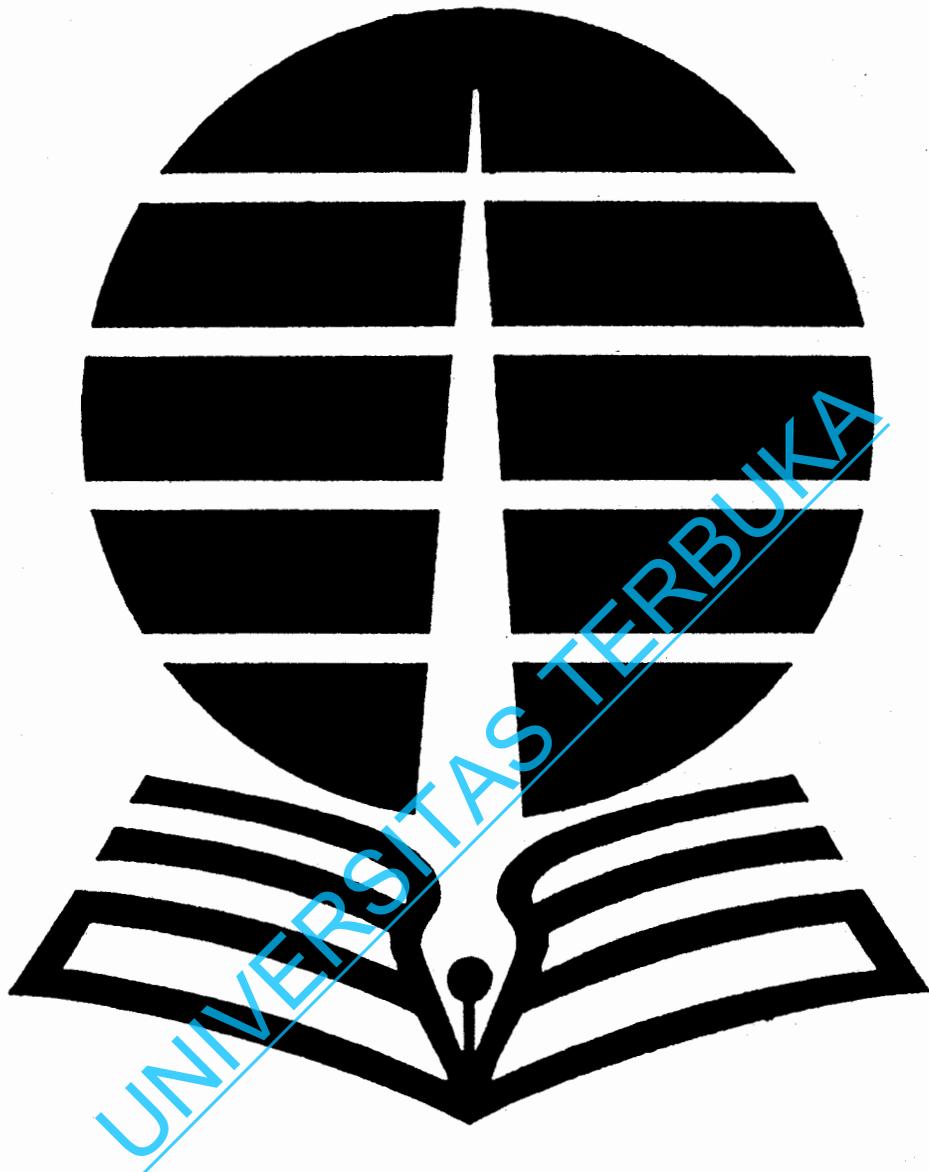
Triangulasi sumber dilakukan dengan meminta penjelasan berulang kepada informan mengenai informasi yang telah diberikannya untuk mengetahui keajegan atau ketegasan informasinya dalam suatu wawancara tambahan. Selain itu keterangan dari informan lain untuk mengetahui derajat kepercayaan informan tersebut.

b. Transferability

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.

c. Dependability

Kebergantungan dan kepastian untuk mengecek serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti akan mendiskusikan dengan pembimbing, secara setahap demi setahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan dilapangan, setelah hasil penelitian dianggap benar, diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum

Secara geografis, luas wilayah administrasi kota Pangkalpinang seluas 89,4 kilometer persegi. Batas wilayahnya meliputi sebelah utara dan selatan berbatasan dengan kabupaten Bangka Tengah, sebelah timur berbatasan dengan laut cina selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Bangka. Sebesar 46,2% luas lahan kota Pangkalpinang digunakan untuk lahan pemukiman penduduk dan hanya 17,5% digunakan untuk lahan pertanian dari luas lahan yang tersedia seluas 1.562 hektar. Salah satu kecamatan yang ada di kota Pangkalpinang adalah kecamatan Bukit Intan. Luas wilayah kecamatan Bukit Intan adalah 36,54 kilometer persegi terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu Semabung Baru, Semabung Lama, Sriwijaya, Bukit Besar, Bacang, Air Itam dan Bukit Intan,.

Penduduk yang tinggal di kecamatan Bukit Intan terdiri dari berbagai etnis diantaranya etnis melayu, cina, madura, bugis, padang, batak, dan sebagainya. Namun, etnis yang paling banyak mendiami kota Pangkalpinang adalah melayu dan cina. Etnis melayu sebagian besar bermata pencaharian swasta (pegawai swasta, dagang, buruh), PNS/TNI/Polri sedangkan etnis Cina mayoritas bermata pencaharian wiraswasta.

B. Kondisi Permasalahan Sosial di Kecamatan Bukit Intan

Berdasarkan hasil identifikasi Penulis terhadap jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kecamatan Bukit Intan terdapat beberapa penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menonjol, yaitu keluarga miskin, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat dan keluarga berumah tak layak huni. Pada dasarnya semua penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut muaranya adalah keluarga miskin. Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi permasalahan sosial yang ada di kecamatan Bukit Intan.

1. Pemberdayaan Perempuan

Menurut jenis kelamin, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dominan adalah kaum perempuan terutama bagi penyandang masalah keluarga miskin dan keluarga rentan. Data di bawah ini menggambarkan kondisi penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut jenis kelamin.

Tabel 4.1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Tahun 2009

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	
		Laki2	Perempuan
1.	Anak/balita Terantar	3 org	5 orang
2.	Lanjut Usia Terlantar	12 org	23 orang
3.	Penyandang Cacat	70 org	39 orang
4.	Eks Napi	15 org	3 orang
5.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	97 orang
6.	Keluarga Miskin	158 jiwa	192 jiwa
7.	Keluarga Bermasalah Psikologis	7 orang	
8.	Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Bencana	40 KK	
9.	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	78 KK	

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Melalui kegiatan pemberdayaan perempuan, peran dan fungsi sosial perempuan diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan potensi diri terkait dengan statusnya sebagai pendamping suami. Pemberdayaan perempuan selama ini dilakukan secara ego sektoral, potensi perempuan selaku pendamping pencari nafkah utama keluarga belum maksimal diberdayakan sebagai pelaku ekonomi penunjang keluarga. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan baru sebatas penguatan kelembagaan dan pemahaman substansi perempuan, padahal perempuan adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan bangsa, artinya peran dan tanggung jawab perempuan mestinya diletakkan pada porsi mitra strategis dalam konteks sosial ekonomi keluarganya.

Dapat dipahami, dengan minimnya anggaran pemberdayaan perempuan mengakibatkan pelayanan dan pemberdayaan perempuan melalui pola pemberian bantuan usaha menjadi sangat rendah. Jika, ditotal dari tahun 2006 hingga 2009, jumlah perempuan yang memperoleh bantuan usaha sebanyak 98 orang. Menurut pandangan dari informan D:

“...meskipun perempuan dalam statusnya sebagai pendamping suami, namun tidak harus mengurangi peran dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan keluarga dan berpartisipasi dalam aktifitas kehidupan sosial ekonomi...pemerintah harusnya memberi perhatian serius terutama adanya komitmen dan keseriusan dalam anggarannya”

Pendapat senada juga diberikan oleh informan S:

“...selayaknya perempuan membantu ekonomi keluarga, jika potensi perempuan diberdayakan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya sudah tentu ekonomi keluarga akan lebih cepat

bangkit..selain itu, Saya melihat belum dilakukan pola terpadu dalam pemberdayaan perempuan antara instansi terkait”

2. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK)

Yaitu pelaksanaan penguatan kesejahteraan sosial keluarga dan bimbingan usaha kesejahteraan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga dewasa agar mampu membangun kemandirian. Sasarannya adalah keluarga dewasa (perkawinan diatas 5 tahun) dalam kategori rentan dan mempunyai embrio usaha ekonomi produktif terutama di kantong-kantong kemiskinan. Pelaksanaannya diarahkan kepada perorangan/keluarga.

Selama ini, pelaksanaan asistensi kesejahteraan sosial keluarga diberikan berupa bimbingan motivasi dan pelatihan kepada keluarga rentan dan memiliki motivasi untuk berusaha. Semestinya, berdasarkan petunjuk teknis kegiatan ini dalam upaya memperkuat lembaga dan pranata keluarga sebagai sumber pemecahan masalah keluarga.

Menurut pendapat informan A:

“...jadi terkesan pelaksanaannya berupa bimbingan dan pelatihan saja..Saya belum memperoleh gambaran mengenai bagaimana kelanjutan dari kegiatan tersebut, Saya belum banyak mengetahui...meskipun ada juknisnya tapi Saya belum memahami semuanya..”

Begitu pula dengan pemahaman informan S:

“...terus terang, kalo ditanya soal itu Saya masih perlu memahami lebih jauh, sebatas informasi bahwa keluarga butuh bimbingan didalam melaksanakan fungsi-fungsinya agar maksimal..”

3. Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri

Yaitu upaya pemberdayaan keluarga muda melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Program ini merupakan perpaduan antara kegiatan pengembangan, bimbingan usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif serta bantuan stimulan. Tujuannya untuk memperkuat kemampuan dan potensi keluarga muda guna meningkatkan kesejahteraannya, sehingga mampu membangun kemandiriannya. Sasaran pelayanan kegiatan ini yakni keluarga muda yang usia perkawinannya baru 5 tahun dan tergolong keluarga rentan. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada kelompok yang berjumlah 5-10 keluarga muda. Kenyataan ini disampaikan oleh informan N:

“...banyak warga yang meminta bantuan melalui kelompok, namun banyak pula yang gagal karena rebutan bantuan...bahkan ada yang belum jalan usahanya sudah dibagi-bagi, padahal bantuan usaha tersebut untuk usaha kelompok..yang sangat memperhatikan seolah-olah sang ketua yang menguasai bantuan usaha itu..”

Informan S:

“..menurut hemat Saya, di daerah ini bagusya bantuan diberikan secara perseorangan tidak kelompok, karena watak orang sini sulit diperintah dan maunya memerintah..”

Pendapat informan DE dan P:

“...sejajurnya dari sisi efektif lebih baik bantuan usaha ekonomi produktif diberikan kepada orang perseorangan daripada kepada kelompok...banyak kelompok diberikan bantuan usaha tapi yang menikmati kebanyakan ketuanya saja, anggotanya hanya sebagai pelengkap kelompok.”

Informan C:

“...meskipun Saya baru mengenal istilah bantuan usaha ekonomi produktif, menurut hemat saya, memang

bagusnya bantuan tersebut langsung untuk anggota keluarga atau individu, karena banyak yang bisaberkembang...”

4. Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga

Merupakan rangkaian kegiatan yang diarahkan pada penyediaan pelayanan konsultasi keluarga dan rujukan kepada lembaga layanan sosial yang kompeten dalam rangka memecahkan masalah keluarga. Sasaran pelayanannya adalah keluarga yang bermasalah, pelayanannya dilakukan oleh berbagai profesi dan organisasi sosial termasuk lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

Menurut informan Ss:

“...andaikan LK3 dikelola secara profesional dan ada dukungan dana, bisa menjadi mitra strategis untuk memberdayakan keluarga miskin...masalah seputar keluarga paling tidak dapat dikurangi.”

Informan Dy:

“...masalah LK3 sebetulnya tidak ada, hanya tidak adanya dana operasional kegiatan, sehingga petugas belum bisa bekerja sesuai yang diharapkan...keberadaan LK3 dapat mempercepat penanganan masalah sosial keluarga...”

C. Kondisi Tenaga Pendamping Sosial

Pendampingan adalah proses kebersamaan terencana antara pendamping dan sasaran serta semua pihak terkait melalui peningkatan kemampuan sasaran baik kemampuan pribadi, antar pribadi maupun politis dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Kondisi riil tenaga pendamping sosial yang telah pernah mengikuti pelatihan keterampilan pekerjaan sosial

melalui kegiatan pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Pendamping Sosial
Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun
2009

NO	ASAL	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Kabupaten Bangka	10	6	4
2.	Kabupaten Bangka Selatan	8	7	1
3.	Kabupaten Bangka Tengah	8	6	2
4.	Kabupaten Bangka Barat	8	4	4
5.	Kabupaten Belitung	10	4	6
6.	Kabupaten Belitung Timur	8	3	5
7.	Kota Pangkalpinang	5	5	0
	JUMLAH	58	36	22

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009.

Tabel 4.3
Jumlah Pendamping Sosial
Per Kecamatan Di Kota Pangkalpinang
Tahun 2006-2009

NO	ASAL	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI2	PEREMPUAN
1.	Kecamatan Gerunggang	4	3	1
2.	Kecamatan Taman Sari	4	4	0
3.	Kecamatan Rangkui	4	3	1
4.	Kecamatan Pangkal Balam	4	4	0
5.	Kecamatan Bukit Intan	4	3	1
	JUMLAH	20	17	3

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Menunjuk pada tabel 4.3 bahwa jumlah pendamping sosial untuk keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan dari tahun 2006-2009 sebanyak empat orang. Rata-rata satu orang pendamping mendampingi keluarga miskin 15-16 keluarga yang memiliki beragam jenis usahanya. Sebenarnya persoalan yang dihadapi oleh para pendamping tersebut karen terdapatnya jenis usaha keluarga binaan yang beraneka macam, sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan usaha

yang berbeda juga. Sedangkan, para pendamping tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mendampinginya.

Hasil wawancara dengan responden N:

“...pada dasarnya kami bukannya tidak mampu mendampingi, tapi perlu diketahui bahwa kami pun tidak dibekali dengan suatu keterampilan teknis dan manajemen usaha...”

Responden S:

“...sebenarnya pemerintah menyiapkan anggaran untuk mendidik kami selaku pendamping sosial bagi keluarga binaan kita, sehingga dalam pendampingan kami sudah dibekali paling tidak pengetahuan dasarnya...”

Responden R:

“...Saya belum pernah ikutan pelatihan, kebetulan diajak teman untuk ikut menjadi tenaga pendamping di Dinas Kesejahteraan Sosial...”

Responden Sm:

“...setahu saya gak kenal sama pendampingnya, dulu ada yang datang waktu bersamaan dengan pemberian bantuan usaha...laporan tidak pernah bikin..abis dak ngerti caranya...”

Tabel 4.4
Jumlah Keluarga Miskin
Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Berdasarkan Jenis Usahanya
Di Kota Pangkalpinang Dari Tahun 2006-2009

NO	ASAL	JUMLAH	JENIS USAHA DIJALANKAN	
			PERORANGAN	KELOMPOK
1.	Warung Jajanan/Jualan Kue/Bikin Kue	104	104	0
2.	Pangkas Rambut/Salon/Rias	3	3	0
3.	Tenun/kerajinan tangan	9	9	0
4.	Tanaman Sayuran/Tani Sayur	19	4	15
5.	Tukang Jahit	2	2	0
6.	Pertukangan Kayu/batu/batako dll	15	6	9
7.	Toko Kelontong	7	7	0
8.	Nelayan	9	9	0

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Berdasarkan data yang terkumpul dari sumber pengelola program bahwa di kecamatan bukit intan jumlah keluarga miskin sebanyak 567 keluarga. Jumlah keluarga miskin yang sudah dilayani sebanyak 62 keluarga. Sebagian besar keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan yang menerima bantuan usaha ekonomi produktif bergerak dibidang usaha jualan dan bikin kue. Seperti yang dikemukakan oleh informan D:

“untuk kecamatan Bukit Intan sebagian besararganya bekerja di sektor swasta, selama ini bantuan usaha yang diberikan cenderung usaha yang cepat menghasilkan duit dan yang banyak adalah usaha jualan dan bikin kue/jajanan...”

Informan A:

“...betul, kebanyakan warga memilih usaha pembuatan makanan karena mudah laku dan dapat langsung diputer modalnya dengan cepat dan tidak butuh waktu lama...”

“...hanya kelemahan kita dalam mengelola program pemberdayaan keluarga miskin ini melalui pemberian bantuan usaha yang dirasakan selama ini, nilai bantuan yang diberikan kadang-kadang ‘tanggung’...seperti orang mau buka usaha bakso misalnya; bahan dan perlengkapan jualannya ada, tapi gerobaknya atau tempat usahanya tidak dibantu.”

Tabel 4.5
Jumlah Keluarga Miskin
Per Kecamatan Yang Menerima Bantuan
Usaha Ekonomi Produktf (UEP)
Di Kota Pangkalpinang Dari Tahun 2006-2009

NO	ASAL	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Kecamatan Gerunggang	35	7	28
2.	Kecamatan Taman Sari	3	0	3
3.	Kecamatan Rangkui	7	0	7
4.	Kecamatan Pangkal Balam	58	11	47
5.	Kecamatan Bukit Intan	62	20	42
	JUMLAH	165	45	120

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan sebagian besar penerima bantuannya adalah kaum perempuan. Kenyataan ini menunjukkan ada kecenderungan bahwa kaum perempuan dipandang layak untuk memperoleh pelayanan dan bantuan usaha. Berdasarkan hasil wawancara beberapa Responden dikatakan bahwa:

“...sebagian besar kaum perempuan ikut membantu ekonomi keluarganya dari usaha-usaha jualan seperti kue jajanan ringan yang dijual keliling dan juga didepan rumah. Sedangkan lelakinya kebanyakan buruh harian, yang penghasilannya juga kurang menentu...”

“Saya berterima kasih.. dengan adanya pemberiaan bantuan usaha ini, telah banyak membantu menambah penghasilan keluarganya..harapan saya program ini jangan sampai habis...”

Menurut penuturan para responden bahwa selama ini pemerintah belum banyak melihat dan menggali potensi sosial ekonomi para perempuan miskin, sebenarnya kekuatan sosial ekonomi keluarga dapat diberdayakan, jika perhatian dan komitmen pemerintah betul-betul dilaksanakan. Pendapat hampir sama dikemukakan oleh responden di lokasi yang berbeda.

“bagaimanapun pemerintah telah banyak berbuat untuk kami-kami yang susah ini,terima kasih banyak, bantuan usaha telah kami usahakan semampu kami..kami juga perlu dikasih semacam bimbinganlah...maksudnya didorong untuk lebih berkembang begitu..”

Tabel 4.6
Jumlah Keluarga Miskin
Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Berdasarkan Jenis Usahnya
Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Dari Tahun 2006-
2009

NO	JENIS USAHA	JUMLAH	USAHA YANG DIJALANKAN	
			PERORANGAN	KELOMPOK
1.	Warung Jajanan/Jualan Kue/Bikin Kue	43	43	0
2.	Pangkas Rambut/Salon/Rias	1	1	0
3.	Tenun/kerajinan tangan	2	2	0
4.	Tanaman Sayuran	5	2	3
5.	Tukang Jahit	2	1	1
6.	Pertukangan Kayu/batu/batako dll	5	1	4
7.	Toko Kelontong	5	5	0
8.	Nelayan	0	0	0

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Program pemberdayaan keluarga miskin dilakukan melalui pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) kepada keluarga binaan. Di kecamatan Bukit Intan dari 62 KK yang sudah diberdayakan, sebanyak 43 KK diberikan dalam bentuk usaha perorangan atau keluarga. Informan D dan C:

“...memang kita juga menyadari bantuan yang diberikan Dinas Kesejahteraan Sosial hanya sekedar stimulan saja, namun alangkah baiknya kalo program ini dilakukan secara tuntas dan mencukupi kebutuhannya, bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) memang cocok untuk usaha keluarga, sehingga mudah memantau keberhasilannya...”

“...pemerintah daerah mestinya juga lebih memperhatikan anggaran untuk ini, sehingga bantuan terasa belum memenuhi harapan penerima atau memecahkan masalahnya...”

Informan A:

“...pemberian bantuan usaha ekonomi produktif sudah sesuai dengan sasaran yang diusulkan, hanya dari jumlah populasi yang dapat kita layani belumlah seimbang dengan realiasinya..ya, mungkin anggarannya terbatas...”

4. Kondisi Nyata Tenaga Pengelola Program

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa tugas dan fungsi pokok secara struktural organisasi, penanganan masalah sosial keluarga miskin dinaungi oleh Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), sejak tahun 2007 seksi ini tidak memiliki kepala seksi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pokok seksi sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt) dengan dibantu oleh beberapa orang staf pelaksana dan pada bulan Maret 2010 baru dilakukan pelantikan pejabat untuk posisi kepala seksinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dibantu oleh para staf, yang terdiri dari empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu orang honorer. Tabel dibawah menunjukkan keadaan personalia pada Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), sebagai berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Pengelola/Personalia
Pada Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT Di Dinas
Kesejahteraan Sosial Provinsi Kep. Bangka Belitung
Tahun 2009/2010

NO.	JABATAN	PANGKAT /GOLONGAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1.	Kepala Seksi	IIIb/Penata Muda Tk. I	PNS	D.IV
2.	Staf	IIIa/Penata Muda	PNS	S1
3.	Staf	Pengatur Muda	PNS	SMA
4.	Staf	Pengatur Muda	CPNS	SMA
5.	Staf	Pengatur	CPNS	D.III
6.	Staf	-	Honorer	S1
	JUMLAH	6 orang		

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009

Jumlah pengelola program sebanyak enam orang yang terdiri dari satu orang kepala seksi dan lima orang staf. Dari sisi pengalaman kerja atau masa kerja masih tergolong muda dan masih perlu pembinaan. Seluruh staf termasuk tenaga-tenaga muda yang memiliki motivasi kerja tinggi, namun minim pengalaman.

Kenyataan ini disampaikan oleh informan D:

“...memang dari sisi jumlah pegawai dibandingkan dengan seksi lainnya sudah memadai, motivasi dan semangat kerja staf sangat bagus...yang perlu dilakukan ke depan dalam hal ini adalah secara terus menerus membina mereka terutama keterampilan teknis dan pengetahuan pekerjaan sosialnya...”

Informan A:

“...secara struktural penanganan program pemberdayaan keluarga miskin dibawah seksi peran keluarga dan KAT. Pada tahun 2009 seksi tersebut ditunjuk seorang pelaksana tugas (plt) untuk membantu tugas sehari-hari...”

C. Struktur Kelembagaan

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 82/HUK/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI menetapkan bahwa Direktorat Pemberdayaan Keluarga merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Kehadiran direktorat ini adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, standarisasi, pedoman dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan keluarga. Salah satu beban pekerjaan yang diemban oleh Direktorat Pemberdayaan

Keluarga adalah memberdayakan keluarga rentan/miskin, wanita rawan sosial ekonomi, dan penanganan keluarga bermasalah sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Direktorat Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi-fungsi yaitu:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama serta pengembangan usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama serta pengembangan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama serta pengembangan usaha;
- d. Bimbingan teknis dibidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama serta pengembangan usaha;
- e. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, dan kerja sama serta pengembangan usaha;
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam Pasal 10 Ayat 1 menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil yakni melaksanakan kebijakan teknis, standarisasi dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pemberdayaan peran keluarga dan komunitas adat terpencil.

Uraian tugas Seksi pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil sebagaimana maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, kerja sama dan pengembangan usaha dibidang pemberdayaan peran keluarga sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis bidang konsultasi dan advokasi sosial, pemberdayaan kelembagaan, pemberdayaan perempuan, kerjasama dan pengembangan usaha di bidang pemberdayaan peran keluarga;
- c. Melaksanakan standar teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur bidang persiapan pemberdayaan, pemberdayaan sumber daya

- manusia, pemberdayaan lingkungan sosial, kerja sama kelembagaan, perlindungan dan advokasi dibidang komunitas adat terpencil;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan lingkungan sosial, perlindungan dan advokasi dibidang komunitas adat terpencil sesuai dengan potensi sosial setempat;
 - e. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan pembina staf;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pada dasarnya, seksi ini secara garis besar menangani dua tugas dan fungsi pokok, yakni keluarga miskin dan Komunitas Adat Tepencil (KAT). Didalam implementasinya program pemberdayaan keluarga miskin dikelola oleh satu tim yang berbeda dengan tim pengelola Komunitas Adat Terpencil (KAT), tapi penanggung jawabnya tetap di kepala seksi. Hal ini terjadi, karena jangkauan pelayanan dan sarannya berbeda sekaligus pendekatannya pun dibedakan. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasinya tetap dibawah seksi peran keluarga dan KAT. Penjelasan diatas sebagaimana disampaikan oleh informan A:

“...dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok kepala seksi peran keluarga dan KAT cenderung lebih fokus pada penanganan program pemberdayaan keluarga miskin, tapi fungsi koordinasi tetap berjalan meskipun pelaksanaan program KAT diserahkan kepada staf lainnya...”

“...struktur organisasi yang ada tidak ada masalah, hanya saja selama ini diisi oleh pelaksana tugas (plt), sehingga kewenangannya terbatas...”

Informan DE:

“...pemberdayaan keluarga miskin sudah sesuai dengan tupoksi dan diserahkan kepada kepala seksi selaku penanggung jawabnya, selama ini dapat berjalan dengan lancar, meskipun belum maksimal karena belum ada pejabat definitifnya...”

D. Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin

Kebijakan teknis yang dijalankan dikembangkan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga Kementerian Sosial RI dan dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pemberdayaan keluarga miskin pada tahun 2006-2009 dititik beratkan pada:

- Perlindungan dan pemulihan keluarga dari hak dan masalahnya;
- Pemantapan dan peningkatan peran perempuan di bidang kesejahteraan sosial;
- Pemeliharaan dan pendayagunaan nilai-nilai dan modal sosial keluarga;
- Peningkatan kemampuan keluarga dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan keluarga miskin merupakan salah satu strategi pemberdayaan sosial terhadap keluarga khususnya pencari nafkah keluarga maupun anggota keluarga berpenghasilan rendah dengan melakukan serangkaian rencana yang mencakup bimbingan sosial, mental dan keterampilan terhadap keluarga miskin serta pemberian fasilitas atau bantuan sosial termasuk bantuan usaha ekonomi produktif kepada perorangan maupun kelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Dalam buku panduan Pola Operasional Pemberdayaan Keluarga Miskin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga Departemen Sosial RI, ada beberapa tolok ukur untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan keluarga miskin dengan indikator masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), manfaat (*outcomes*) dan dampak (*impact*).

Dalam upaya tersebut didukung dengan beberapa kegiatan prioritas yang dikembangkan dalam program pemberdayaan keluarga miskin, dengan melihat beberapa indikator-indikator, yaitu:

1. Indikator Masukan (*input*)

Masukan adalah faktor kunci yang digunakan sebagai input bagi berlangsungnya program pemberdayaan keluarga miskin dengan tolok ukur tersedianya pedoman atau acuan teknis, ketepatan sasaran pemberdayaan, tersedianya potensi dan sumber daya lokal, tersedianya fasilitas pemberdayaan, tersedianya petugas sosial dan pendamping sosial serta yang lebih pokok adalah tersedianya anggaran pemberdayaan yang memadai.

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Informan A:

“...sejujurnya Saya katakan, memang banyak pedoman atau juknis yang dikeluarkan Departemen Sosial, namun tidak sepenuhnya Saya dapat pahami dan juga terapkan...tapi, Saya yakinlah staf saya memahami dan melaksanakannya dengan baik..yang pasti UUD 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk melihara/melayani orang-orang seperti ini...”

“...saat Kami bersama anggota DPRD Provinsi kunjungan ke lapangan, apa yang telah kita perbuat sudah sesuai terutama sasaran penerimanya tepat sasaran...hanya terus terang Saya

masih belum puas, karena bantuan usaha yang diberikan ada yang tanggung...”

“...sepanjang pengetahuan Saya, ada petugas sosial kabupaten/kota yang membantu kita dan biasanya ada pendamping dari masyarakat juga, kalau dak salah tiap kecamatan ada satu orang...soal pembinaan setelah abis program ini nampaknya belum jelas, sebagaimana yang saya ketahui ya...”

“soal anggaran kesejahteraan sosial khusus dari pemerintah daerah memang belum memuaskan, kita maklumi karena banyak proyek-proyek infrastruktur...”

Informan A nampak belum sepenuhnya memahami dan mendalami program pemberdayaan keluarga miskin. Memang pejabat tersebut termasuk pejabat baru di Dinas Kesejahteraan Sosial. Kekurang pemahannya mengenal program pemberdayaan keluarga miskin yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada.

Informan Dy:

“...juklak-juknis ada, kita mengacu pada apa yang ditentukan..di lapangan kita juga dihadapkan banyak kendala seperti banyak keluarga miskin yang tidak bisa kita bantu karena keterbatasan anggaran dan juga sudah diplot..sementara mereka itu layak dan urgen untuk kita berdayakan...Padahal kita sama-sama paham bahwa mereka (keluarga miskin/rentan) berhak memperoleh pelayanan dan perlindungan sosial...”

“...sasaran yang kita berdayakan sesuai dengan data yang diusulkan, mereka juga kita dampingi dalam menjalankan bantuan usaha...andaikan dananya memadai kita ingin setiap kelurahan itu ada satu orang pendamping sosial, sehingga mudah dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat... selama saya menangani program ini, rasa-rasanya kita belum pernah melakukan pola pembinaan terpadu maksudnya secara resmi melakukan pembinaan lanjutan baik antar bidang, dinas sosial kabupaten/kota maupun lintas sektoral...”

Informan S:

“...untuk pelaksanaannya sudah tentu merujuk pada juknis yang diberikan Depsos RI, Saya pikir semua itu sudah

dilaksanakan, namun perlu pengembangan sesuai kondisi di sini...”

“...Saya kurang tahu, sejauhmana pelaksanaan monevnya, proses pelaporan dan pembinaannya..mungkin yang memahaminya staf di bidang pemberdayaan sosial (maksudnya pengelola program, pen.)

Dalam pandangan Hogwood dan Gunn (1993) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori, yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Dalam implementasi program pemberdayaan keluarga miskin sebagaimana yang dirumuskan dalam petunjuk teknis dan petunjuk operasionalnya secara detil disajikan sebagai panduan bagi pengelola program dan pelaksana di lapangan belum mampu diimplementasikan secara utuh dan substansif. Selain itu, setiap pengelola program diharuskan menyusun dan menetapkan petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) untuk dijadikan pedoman kerja. Kenyataan ini dipertegas dari pernyataan beberapa informan.

Informan A:

“...Saya pikir semua yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan pelaksana semisl juklak/juknis untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga miskin sudah ada dan sangat memadai, hanya saja mungkin tidak secara total dapat diikuti...saya sendiri baru mulai mengenal istilah-istilah sosial, apalagi detilnya saya rasa belum lah dan setahu saya setiap pelaksana kegiatan diharuskan membuat POK/ROK sebagai pedoman teknis yang harus diikuti, untuk implementasinya saya kurang tahu atau berapa persen yang bisa dipedomani”.

Informan Dy:

“...bukannya tidak mengikuti petunjuk yang sudah ada secara penuh, melainkan kadangkala kita dihadapkan pada realita lapangan yang belum memungkinkan untuk diterapkan...contohnya soal kriteria penerima, besarnya nilai yang diinginkan, kriteria pendamping dan sebagainya”.

Informan P dan K:

“...juklak/juknis ada dan biasanya diberikan oleh direktorat keluarga miskin setiap tahun, selanjutnya kita diminta untuk membuat semacam panduan operasional kegiatan...dalam implementasinya kadang-kadang terlupakan, maksudnya sering menyimpang mungkin soal waktu, tempat, peserta dan lain sebagainya...kita mengerti sebenarnya harus merujuk pada itu, tapi kendala teknis di lapangan berkata lain...”

2. Indikator Proses (*process*)

Proses merupakan serangkaian atau langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan selama program pemberdayaan keluarga miskin berlangsung dengan tolok ukur terlaksananya sosialisasi atau diseminasi program, terlaksananya kegiatan pengumpulan data dan seleksi sasaran, terlaksananya kegiatan pengungkapan dan pemahaman kebutuhan, terlaksananya mobilisasi sumber lokal, terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Menurut pendapat informan A bahwa didalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin sudah mengikuti langkah-langkah yang digariskan. Namun, hasil yang dicapai tidak semuanya sempurna dan masih perlu pembenahan.

Pernyataan serupa dikemukakan oleh Informan S:

“Saya selaku...melalui para pelaksana program saya yakin sudah mengikuti arahan atau langkah-langkah sebagaimana yang ditetapkan, ...dari pengamatan saya

nampaknya implementasi program ini masih perlu dilakukan secara terpadu dan terus menerus

Informan A:

“...sosialisasi program disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan, kita maklumi kadang-kadang masyarakat ini tidak pernah merasa cukup..disini kita jelaskan bahwa Dinas Kesejahteraan Sosial hanya berupaya memotivasi dan bantuan yang diberikan hanya stimulan..berhasil atau tidak tergantung kalian bagaimana memanfaatkannya..”

Informan Dy:

“..sebenarnya yang kita lakukan adalah bimbingan sosial bukan sosialisasi program, itu kita laksanakan pada saat mau memberikan bantuan...staf kita juga telah ke lapangan untuk mengecek kelayakan dan mendata kebutuhan apa yang diperlukan, hanya banyak kendala dilapangan seperti alamat sasaran tidak jelas, petugas setempat tidak mengenal, lokasinya sulit, dan lain-lain..”

“...monitoring tetap kita lakukan, hanya terus terang kegiatan evaluasi jarang dilakukan, kalaupun dilakukan baru sebatas bantuan usaha bukan evaluasi program secara keseluruhan...sebetulnya penting sih, tapi belum sampai kesitu lah..untuk laporan kita buat laporan realisasi keuangan dan fisik serta laporan pelaksanaan kegiatan...kami tidak terima laporan berkala dari pendamping sosial dalam melaporkan hasil pendampingannya.”

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal, Hoogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama,

atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*) (Abdul Wahab, 1997).

Berkaitan dengan pandangan Hoogwood dan Gunn di atas, implementasi program pemberdayaan keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dapat dilaksanakan sesuai sasaran pelayanan dan anggaran yang tersedia, secara umum masyarakat dapat menerima program ini dan merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan. Hanya saja, menurut penuturan informan Sy dan S, pada prinsipnya program pemberdayaan keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang masih perlu adanya program pengembangan dan

keterpaduan dalam hal pola pembinaan lanjutan baik lintas sektor maupun intra bidang di Dinas Kesejahteraan Sosial. Karena, menurutnya kendala yang dirasakan adalah lemahnya koordinasi dan integrasi program antar bidang serta kurangnya pemahaman pengelola program didalam pengembangan dan pendalaman konsep pemberdayaan itu sendiri. Sehingga, implementasi program pemberdayaan keluarga miskin seolah-olah bergerak sendiri-sendiri dengan program yang lainnya, padahal penanganan masalah sosial keluarga miskin bersifat multi program. Dalam hal ini Grindle (dalam Winarno, 2007:146) memberikan pandangan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dengan demikian, pengelola program pemberdayaan keluarga miskin diharapkan akan mampu mengaitkan dan mengakses dengan sistem sumber kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan dalam upaya mempercepat penanganan masalah sosial yang dihadapi keluarga miskin.

3. Indikator Keluaran (*output*)

Keluaran adalah hasil langsung yang diperoleh dari kegiatan program pemberdayaan keluarga miskin, yang merupakan indikator hasil fisik dari pencapaian tujuan spesifik (*objective*). Indikator keluarannya adalah berapa banyak jumlah keluarga yang dapat diberdayakan oleh menteri/dinas terkait dan

jumlah keluarga yang ditangani oleh masyarakat. Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2007:145) menyebutkan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) ini menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan keluarga miskin dilakukan baru pada tataran pelaksanaan tugas dan fungsi pokok. Pengelola program belum berorientasi pada capaian kinerja atau hasil yang diharapkan, yaitu peningkatan peran dan fungsi sosial sasaran yang diberdayakan.

Informan S:

“program ini memang sudah ada sejak tahun 2006 dan tiap tahun secara rutin dilaksanakan oleh seksi peran keluarga, sumber dananya kayaknya APBN...soal hasilnya itu sebaiknya langsung ditanyakan pada kepala seksinya..mungkin beliau bisa memberikan datanya...”

“...memang ada dunia usaha seperti PT. Timah Tbk, PT. Telkom menyalurkan program pemberdayaan masyarakat, hanya saya kurang tahu persis kelompok masyarakat mana yang diberdayakannya...?”

Informan A:

“...setau saya tahun 2006 tapi sebelumnya sudah ada namun nama programnya yang beda...memang program pemberdayaan keluarga miskin ini dikelola oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi dari dana

dekonsentrasi dan sedikit dana APBD provinsi...tapi berapa banyak keluarga yang dilayani angka detilnya Saya tidak mengetahui, coba tanyakan ke penanggung jawab kegiatan atau kepala seksinya...yang jelas kita telah membantu keluarga miskin, apalagi keterlibatan masyarakat, sejauh ini belum ada informasi berapa jumlah orang yang diberdayakan oleh masyarakat...”.

Informan Dy:

“...anggaran berasal dari Depsos RI melalui dana dekon dan ada juga dari dana APBD Provinsi tapi sangat kecil. Jumlah keluarga yang sudah diberdayakan di kecamatan Bukit Intan sampai tahun 2009 baru 62 keluarga...yang dari masyarakat tidak diketahui ada tidaknya..”

Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106). Sejalan dengan pandangan Parsons, Jim Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan sebagai sarana untuk memberikan orang dengan sumber-sumber, kesempatan-kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat menentukan masa depannya dan berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka (Ife,1995:183). Lebih tegas lagi bahwa bagaimana pengambil keputusan dalam menempatkan program dan anggaran bagi orang-orang lemah, sehingga mampu menciptakan keseimbangan pada struktur kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil.

4. Manfaat (*outcomes*)

Indikator manfaat dari program pemberdayaan keluarga miskin meliputi: jumlah sasaran yang berdaya dan mandiri, jumlah keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan di lingkungan sosialnya, jumlah keluarga yang memiliki rasa kepedulian sosial terhadap lingkungan sosialnya, dan jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan keluarga miskin. Menurut data (dokumentasi) dan yang disampaikan oleh informan DE melalui wawancara:

“...karena kita belum sampai mengukur manfaat secara menyeluruh, jadi rasa-rasanya Saya belum tahu berapa banyak yang sudah mandiri dan berkembang, laporan pun tidak ada dari para pendampingnya...”

Informan Dy:

“...Saya rasa ada yang berkembang, cuma jumlah persisnya kurang tahu...pendamping tidak memberikan laporan kemajuan keluarga binaannya..lagian susah untuk melihat atau mengukur mandiri atau tidaknya..bisa jadi karena usaha lain diluar bantuan dari kita..”

Responden S:

“...Saya tidak paham berapa jumlahnya..kami selaku pendamping belum dibekali pengetahuan untuk itu..ada pertemuan dengan petugas sosial tapi tidak membahas mengenai laporan dan tugas-tugas pendamping..jadi Saya kurang tahu lah..”

Hal senada dikemukakan oleh responden A:

“...tidak tau pak, ada sih tapi berapanya gak tahu..sebetulnya sebelumnya kami diajari dulu cara membuat laporan dan apa saja yang menjadi tanggung jawab kami..kami bekerja ala kadarnya, datang ke lokasi ngobrol-ngobrol abis itu pulang, begitu..”

Responden AT:

“...waktu pelatihan pendamping sosial, materinya kurang sesuai dengan kebutuhan dilapangan, maksud

saya bukan yang diinginkan...kita perlu keterampilan teknis atau cara-cara membuat laporan dll yang berkaitan dengan tugas kita dilapangan...?

Responden B (penerima bantuan usaha):

“...untuk nambah-nambah belanja dapur lumayan lah..dak tau ya apa maju atau tidak usaha ini..dulu saya dibantu bahan-bahan dan perlengkapan buat kue, alhamdulillah sampai sekarang masih ada..”

“...pernah sekali ke sini pendampingnya, waktu penyerahan bantuan itu...saya tidak kenal sama petugas sosialnya..dan saya tidak diminta untk membuat laporan...”

“...kalo hubungan dalam keluarga ya baik-baik lah...sama tetangga juga akur, alhamdulillah...tapi penghasilan dari usaha ini belumlah mencukupi, yah sebatas untuk makan lah”

Mengacu pada Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampinginya. *Fasilitator*, Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan peran pendidik. *Perwakilan masyarakat*, peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampungannya. Pendamping sosial dapat bertugas

mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. *Peran-peran teknis*, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi ‘manajer perubahan’ yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pendamping sosial diterangkan bahwa mereka melaksanakan tugas dan perannya belum sampai pada peran-peran yang strategis, tapi baru sebatas memotivasi dan mengarahkan agar bantuan yang diberikan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Secara teknis, kemampuan para pendamping sosial masih perlu dikembangkan dan diberdayakan ke arah peningkatan kemampuan petugas (*capacity building*) yang aplikatif dan praktis, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendampingannya.

5. Dampak (*impact*)

Dampak yaitu akibat yang ditimbulkan karena adanya suatu investasi program, dan umumnya dalam jangka waktu lebih lama dari manfaat langsung dan indikator pencapaian

tujuan umum, seperti meningkatnya kemandirian keluarga, meningkatnya ketahanan sosial keluarga. Secara umum dapat dikatakan bahwa untuk pengukuran dampak yang dirasakan belum dapat dilakukan, penilaian pemerintah baru sebatas manfaat saja.

E. Hasil Analisa Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin

Hasil analisa implementasi program pemberdayaan keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kesimpulan Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Ditinjau Dari Indikator Masukan (*input*)

NO	INDIKATOR	HASIL ANALISIS	FAKTOR PENYEBAB
1.	Masukan (<i>input</i>):		
	a. Tersedianya pedoman dan acuan teknis;	<ul style="list-style-type: none"> Juknis/Petunjuk Operasional terse dia & lengkap, tapi dalam implementasinya belum maksimal; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelola program masih rendah untuk memahami & mengikutinya sebagaimana yang digariskan;
	b. Ketepatan sasaran	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran pelayanan sudah sesuai dengan data yang diusulkan dan layak memperoleh bantuan; 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya database keluarga miskin dan dilakukannya seleksi;
	c. Potensi & sumber lokal;	<ul style="list-style-type: none"> Belum disjnergikan & diberdayakan; 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelola program dan masyarakat setempat kurang jeli melihat potensi lokal;
	d. Tersedianya fasilitas pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlibatan masyakat dalam pemberdayaan keluarga miskin sangat rendah; 	<ul style="list-style-type: none"> Instansi terkait belum melakukan sinergisitas dan kemitraan dalam pemberdayaan keluarga miskin;
	e. Tersedianya petugas dan pendamping sosial	<ul style="list-style-type: none"> Petugas sosial dan pendamping sosial ada, namun lemah didalam menjalankan tugas dan fungsinya; 	<ul style="list-style-type: none"> Pendamping sosial tidak dibekali dengan pengetahuan dasar pekerjaan sosial dan tidak adanya pelatihan khusus pendampingan;
	f. Tersedianya anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran ada, namun belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> APBD rendah untuk urusan sosial

Tabel 4.9
Kesimpulan Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari Proses (*process*)

2.	<p>Proses (<i>process</i>)</p> <p>a. Terlaksananya sosialisasi & diseminasi program;</p> <p>b. Terlaksananya pengumpulan data dan seleksi;</p> <p>c. Terlaksananya pengungkapan dan pemahaman kebutuhan;</p> <p>d. Terlaksananya mobilisasi sumber lokal/setempat;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi program tidak dilakukan sesuai juknis, tapi hanya berupa pertemuan biasa; • Data sasaran pelayanan sesuai dengan data usulan program dan dilakukan seleksi calon keluarga binaan; • Petugas melakukan inventarisir kebutuhan sasaran, tapi tidak diikuti dengan kesesuaian antara kebutuhan dengan masalahnya; • Lemahnya koordinasi dan belum dilakukan hubungan kerja dengan potensi lokal dalam membangun potensi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dalam DIPA tidak tersedia; • Sudah tersedianya database keluarga miskin dari BPS dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota; • Keterbatasan pengalaman & pengetahuan petugas dalam melakukan diagnosis kasus dan akar permasalahan serta minimnya nilai anggaran yang tersedia; • Pihak pengelola program belum membangun komunikasi dan kemitraan dengan stakeholders lainnya;
	<p>e. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi & pelaporan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola program pemberdayaan keluarga miskin secara berkala tidak melakukan evaluasi untuk melihat faktor-faktor yang menghambat dan pendukung keberhasilan pelaksanaan program; • Monitoring dilakukan dalam rangka mengawasi proses penyaluran bantuan, tapi bukan pada proses pengelolaan bantuan; • Laporan realisasi bulanan, triwulan, semester dan tahunan dibuat dan dilaporkan dengan tertib termasuk tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan; • Tidak adanya laporan pelaksanaan tugas dari pendamping sebagai bahan evaluasi dan laporan kemajuan pelaksanaan program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman terhadap fungsi evaluasi program dan mekanisme pengelolaan program yang efektif; • Keterbatasan kemampuan petugas didalam melakukan kegiatan monitoring dan supervisi; • Dilakukan ketertiban laporan dengan aplikasi sistem akuntansi modern setiap akhir bulan; • Pendamping sosial tidak dibekali dengan pengetahuan & keterampilan sebagai dasar pelaksanaan tugas pekerjaannya. Serta belum terarahnya pelatihan bagi pendamping sosial.

Tabel 4.10
Kesimpulan Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Ditinjau Dari Keluaran (*output*)

3.	Keluaran (<i>output</i>)		
	a. Jumlah keluarga yang diberdayakan oleh menteri/dinas terkait;	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola program tidak seluruhnya mengetahui berapa banyak keluarga miskin yang sudah diberdayakan dan berhasil, hanya secara umum diketahui jumlah sasaran keluarga yang menerima bantuan/dilayani, tapi bukan yang masuk kategori diberdayakan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya laporan dari petugas dan pendamping sosial dan tidak dilakukan pembinaan lanjutan kepada keluarga miskin yang telah memperoleh bantuan & bimbingan;
	b. Jumlah keluarga yang ditangani oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak pengelola program secara langsung belum melibatkan dan melakukan kemitraan dengan masyarakat dalam pemberdayaan keluarga miskin di kecamatan Bukit Intan bahkan di kota Pangkalpinang, namun secara sepihak sudah ada dunia usaha yang peduli dengan pemberdayaan keluarga miskin melalui dana CSR mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kebijakan dan terbangunnya komitmen dari pemerintah daerah; • Tidak ada laporan tertulis dari masyarakat atau dunia usaha yang melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin ke Dinas terkait • Pengelola program kurang proaktif didalam membangun koordinasi dan mengembangkan program

Tabel 4.11
Kesimpulan Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin
Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Ditinjau Dari Manfaat (*outcomes*)

4.	Manfaat (<i>outcomes</i>) a. Jumlah sasaran yang berdaya dan mandiri;	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola program tidak memiliki data pasti berapa banyak keluarga miskin yang menerima bantuan dapat bertahan, berkembang dan mandiri dalam menjalankan usahanya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Karena petugas jarang supervisi, lemahnya evaluasi dan minimnya laporan dari pendamping sosialnya;
	b. Jumlah keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan di lingkungan sosialnya; c. Jumlah keluarga yang memiliki rasa kepedulian sosial terhadap lingkungan sosialnya; d. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Pada dasarnya hubungan interaksi baik internal maupun dengan lingkungan sosialnya berlangsung biasa-biasa saja, tidak banyak ditemukan hambatan; • Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara, partisipasi keluarga miskin dalam aktifitas sosial tetap berlangsung baik hanya pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan; • Tidak ada data konkret, hanya secara tidak langsung dalam konteks dunia usaha ada beberapa dunia usaha yang melakukan pemberdayaan keluarga miskin di sekitar lokasi tempat usahanya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai sosial dan budaya lokal yang masih kuat; • Adanya ikatan emosi dengan lingkungan sosialnya, dan masih kuat budaya tolong menolong; • Adanya tuntutan bagi dunia usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana amanat UU Nomor 40 tahun 2007 tentang PT yang memuat pasal tentang CSR dunia usaha.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, yaitu pola penanganan yang selama ini dilakukan oleh Pengelola Program belum mengarah kepada pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada, sehingga pendekatan pemecahan masalahnya bertumpu pada aspek material/anggaran atau dengan kata lain bantuan sosialnya, padahal konsep pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan banyak ahli menekankan pada beberapa faktor, yaitu proses pemberdayaan tidak terlepas dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, hubungan/jaringan kerja, partisipasi, keadilan, yang paling pokok adalah kemandirian keluarga miskin itu sendiri agar mampu menggali potensi yang ada dan memanfaatkan akses sumber yang memungkinkan untuk digunakan dalam upaya memecahkan masalahnya; Kondisi ini dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran yang tidak seimbang dengan tingkat permasalahan dan populasi keluarga miskin;
2. Sumber daya manusia yang terbatas;
3. Minimnya peran serta masyarakat dalam membantu mempercepat penanganan masalah sosial keluarga miskin di sekitarnya;

4. Pengelola program kurang memperhatikan petunjuk teknis/pelaksanaan (juknis/juklak);
5. Pola pembinaan lanjutan tidak dilakukan secara sinergis dan lintas sektoral;
6. Pengelola program belum maksimal dalam melakukan pengawasan, supervisi dan evaluasi secara terpadu dan sistematis, sehingga sulit untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan atau capaian program yang telah dilakukan.

B. Saran

1. Saran Praktis

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah semestinya mengalokasikan anggaran Program Pemberdayaan Keluarga Miskin yang seimbang dengan tingkat permasalahan dan kebutuhan penanganannya;
- b. Pengelola Program lebih fokus didalam melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan instansi lintas sektor guna keberlanjutan dan keterpaduan serta sinergitas dalam penanganan pemberdayaan keluarga miskin baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan juga evaluasi program;
- c. Pola pendampingan dan pembinaan dalam program pemberdayaan keluarga miskin perlu mengedepankan metode dan pendekatan pekerjaan sosial, yaitu menempatkan sasaran

sebagai manusia yang memiliki kemampuan dan potensi bukan objek pelayanan semata;

- d. Pendamping sosial perlu mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pelatihan teknis yang memadai mengenai pekerjaan sosial melalui berbagai pelatihan atau bimbingan/pembekalan teknis sesuai dengan kebutuhan pendampingannya;
- e. Pengelola program perlu membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan semua stakeholders kesejahteraan sosial, termasuk dunia usaha;

2. Saran Teoritis

Pendekatan penanganan masalah keluarga miskin agar lebih efektif dilakukan dengan metode *group work* (pendekatan keluarga dalam istilah *social work*) yang menekankan pada kekuatan dan potensi dalam keluarga itu sendiri sebagai sumber pemecahan masalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal, Ph.D. (2006). *Kebijakan Pelayanan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- _____. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. (2007). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Burhan. (2001). *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2001). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwin, Muhajir. (1995). *Teori Administrasi*. Program Study Magister Ilmu Administrasi. Surabaya: Program Pasca Sarjana Untag.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. (1995). *Manfaat Pengembangan Study Kebijakan Publik Untuk Pembangunan daerah*. Lokakarya Kebijakan Sosial. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM tanggal 11-12 Juli.
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Pubik Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Engelhardt, Lee J Bain Max, 1991. *Introduction to Probability and Mathematical Statistic*, Duxbury Press, Belmont, California.
- Gaffar, Afan. (1998). *Public Policy: State of the Discipline. Models and Process*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM. Tidak diterbitkan.
- Henry, Nicholas. (1995). *Adminitrasi Negara dan Masalah-masalah Publik*. Yakarta: Raja Grafindo Persada.

- Hikmat, Harry. (1999). *Indikator Kesejahteraan Sosial (materi latihan perencanaan S3CB Bappenas)*. Makalah yang tidak dipublikasikan.
- _____. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Ife, Jim. (1995). *Community Development: Creating Community Alternative Vision, Analysis and Praticice Australia*. Longman.
- Islamy, M. Irfan. (2001). *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pascasarjana Unibraw.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Miles, M.B dan Huberman, *Metode Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. (1992). Jakarta: UI Press.
- _____. (...). *Methodes Qualitative data Analisis A Sourcebook of New Method*. Beverly Hills London: Sage Publicaion.
- Nawawi, Hadari (2004). *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Parsons, Wayne. (1997). *Public Policy: An Intoduction o the theory and practice of Policy Analysis*. Edward Elgar.Cheltenham, UK. Lyme US.
- Pranaka dan Vidyandika M. (1996). *Pemberdayaan*. Jakarta: CSIS.
- Priyono, S. Onny, Preanarka, A.M.W. (Ed). (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Sabatier, Paul A & Mazmanian, Daniel A. (1987). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company. University of California. Al Davis.
- Salim, Agus. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2006). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Spektrum Pemikiran*. Bandung: LSP-STKS.

_____. (2008). *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2008). *Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sulaiman, Holil, APU. (1999). *Pemberdayaan*, Bandung: STKS.

Sumodiningrat, Gunawan. (2009). *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.

Wahab,S.Abdul. (1997). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. (1999). *Analisa Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT. Danar Wijaya.

Wasserman, John Neter William. (1973). *Applied Linear Statistical Models, Analysis of Variance and Experimental Designs*. Canada

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wibowo, Samodro. (1995). *Studi Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

B. Dokumen Perundang-undangan

Kementerian Pendidikan Nasional RI (2000). Kamus Besar Edisi Ketiga. Diambil 6 September 2010, dari situs World Wide Web Wa2cantique.blogspot.com/2009/03

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2007). *Pola Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Kemiskinan, perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Keluarga, Departemen Sosial RI.

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. (2005). *Desain Program Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Keluarga, Departemen Sosial RI.

Najmudin. (2009). Arti dan makna kesetiakawanan sosial. Diambil 6 September 2010, dari situs World Wide Web najmudincianjur.blogspot.com/2009/10

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, tentang *Kesejahteraan Sosial*.

UNIVERSITAS TERBUKA



PEDOMAN WAWANCARA

NO.	IDENTITAS MAHASISWA	
1.	Nama	: NUSATION
2.	N I M	: 015535673
3.	Tempat Kuliah	: UPBJJ UT Pangkalpinang
4.	Program	: Magister Administrasi Publik
5.	Judul Tesis	: “Implementasi Program Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang”

NO.	IDENTITAS RESPONDEN	
1.	Nama	
2.	Umur	
3.	Pendidikan Terakhir	
4.	Status Perkawinan	
5.	Pekerjaan	
6.	Jabatan	
7.	Alamat	
8.	Keterangan Lainnya	

UNIVERSITAS TERBUKA

- I. Pertanyaan untuk Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kep. Bangka Belitung/ Kepala Bidang Bina Program/Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Kepala Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT/Kepala Seksi Perencanaan Program/Kepala Seksi Monev dan Pelaporan.

NO	PERTANYAAN
1.	Sejak kapan kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin dilaksanakan di dinas ini? <i>Jawaban:</i>
2.	Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan wewenang dan tanggungjawab dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin? Siapa saja pihak yang berkepentingan dalam menangani masalah sosial keluarga miskin? <i>Jawaban:</i>
3.	Apakah ada petunjuk teknis dalam melaksanakan kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin? <i>Jawaban:</i>
4.	Apakah masyarakat/kelompok tertentu/dunia usaha juga dilibatkan dalam pelaksanaan pemberdayaan keluarga miskin? <i>Jawaban:</i>
5.	Apakah telah dibentuk tim pengelola/pelaksana teknis untuk melaksanakan pemberdayaan keluarga miskin? <i>Jawaban:</i>
6.	Apakah pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin sudah sesuai dengan peraturan menteri atau peraturan teknis lainnya? <i>Jawaban:</i>
7.	Apakah program pemberdayaan keluarga miskin dapat diterima dimasyarakat? Jika belum, mengapa? <i>Jawaban:</i>
8.	Apakah program pemberdayaan keluarga miskin sudah sesuai dengan tugas dan fungsi pokok bidang atau seksi yang ada? Jika tidak, mengapa terjadi? <i>Jawaban:</i>
9.	Apakah program pemberdayaan keluarga miskin sudah disosialisasikan sebelumnya? Melalui apa saja metode sosialisasi yang dilaksanakan? <i>Jawaban:</i>
10.	Apakah program pemberdayaan keluarga miskin ke depan akan diteruskan dan dikembangkan? Jika tidak mengapa? <i>Jawaban:</i>
11.	Apakah ada seksi atau bagian tertentu yang mengurus program pemberdayaan keluarga miskin? Apakah ada struktur organisasinya? Jika ada bagaimana

	strukturnya?
	<i>Jawaban:</i>
12.	Apakah mekanisme pelayanan sosial dalam program pemberdayaan keluarga miskin sudah dilaksanakan ? Jika sudah bagaimana implementasinya di lapangan?
	<i>Jawaban:</i>
13.	Apakah ada dana untuk pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin? berapa alokasi anggaran yang tersedia, apakah cukup jika dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus ditangani? Bagaimana sumber pembiayaannya?
	<i>Jawaban:</i>
14.	Apakah personil sumber daya manusia sudah tersedia baik jumlah maupun kualitasnya?
	<i>Jawaban:</i>
15.	Apa saja fasilitas/Sarana penunjang yang tersedia untuk mendukung tercapainya program pemberdayaan keluarga miskin?
	<i>Jawaban:</i>
16.	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi program pemberdayaan keluarga miskin?
	<i>Jawaban:</i>
17.	Apakah ada pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan guna meningkatkan kemampuan petugas didalam mengelola program yang ada?
	<i>Jawaban:</i>
18.	Apakah ada pertemuan antara instansi terkait yang berwenang misalnya Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kep. Bangka Belitung dan Dinas Sosial Kota Pangkalpinang untuk mendukung tercapainya program pemberdayaan keluarga miskin?
	<i>Jawaban:</i>
19.	Apakah program pemberdayaan keluarga miskin secara keseluruhan sudah berhasil di Kota Pangkalpinang? Jika belum, kendala apa saja di lapangan?
	<i>Jawaban:</i>
20.	Apakah program pemberdayaan keluarga miskin merupakan satu-satunya program yang menangani masalah sosial keluarga miskin?
	<i>Jawaban:</i>
21.	Apakah yang dimaksud dengan bantuan usaha ekonomi produktif? Apakah ada bantuan lainnya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin yang dilaksanakan oleh instansi Bapak?
	<i>Jawaban:</i>
22.	Apakah dengan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) penanganan masalah sosial keluarga miskin sudah cukup? dan bagaimana melaksanakan dan mengelolanya?

	<i>Jawaban:</i>
23.	Apakah pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan? Jika belum, Mengapa?
	<i>Jawaban:</i>
24.	Apa saja kendala yang berhubungan dengan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)?
	<i>Jawaban:</i>
25.	Apakah ada petugas khusus yang mendampingi keluarga miskin penerima bantuan dalam menjalankan usahanya?
	<i>Jawaban:</i>
26.	Apakah ada petugas khusus yang mendampingi keluarga miskin penerima bantuan dalam menjalankan usahanya?
	<i>Jawaban:</i>
27.	Apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi pendamping sosial?
	<i>Jawaban:</i>
28.	Apakah ada pembinaan lanjutan dari instansi teknis/lintas sektor untuk memperkuat permodalan usaha keluarga miskin?

II. Pertanyaan untuk petugas pendamping sosial/staf pelaksana lapangan

1.	Apakah petugas pendamping sosial pernah dididik dan dilatih sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)? Jika sudah, apakah memperoleh sertifikat kelulusan sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)?
	<i>Jawaban :</i>
2.	Apakah sudah dilaksanakan bimbingan khusus dalam memberikan pendampingan sosial kepada keluarga miskin?
	<i>Jawaban :</i>
3.	Apakah sudah ada pedoman pelaksanaan atau juklak dalam melaksanakan tugas pendampingan?
	<i>Jawaban :</i>
4.	Apakah pendamping sosial memahami tugas, peran dan tanggung jawab yang diberikan? Jika ya, apa saja tugas dan tanggung jawabnya?
	<i>Jawaban :</i>
5.	Apakah ada pertemuan berkala antara pengelola program dengan pendamping sosial? Jika ya, seperti apa kegiatan pertemuan tersebut?
	<i>Jawaban :</i>
6.	Apakah pendamping sosial diharuskan membuat laporan tertentu terhadap pelaksanaan tugas dan perannya dalam proses pendampingannya? Jika tidak, apakah kendalanya? dan jika iya, berapa

	bulan sekali?
	<i>Jawaban :</i>
7.	Apakah pengelola program dalam melaksanakan pelayanan kepada Anda memuaskan? Mengapa?
	<i>Jawaban :</i>
8.	Apa saja kendala yang dialami dalam melaksanakan tugas pendampingan?
	<i>Jawaban :</i>
9.	Apakah Anda mendapatkan honor dari pelaksanaan tugas sebagai pendamping sosial? Jika ya, apakah sudah memadai?
	<i>Jawaban :</i>

III. Pertanyaan kepada keluarga miskin penerima bantuan/masyarakat?

1.	Apakah Anda mengenal program pemberdayaan keluarga miskin (bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)? Jika ya, bagaimana pendapatnya?
	<i>Jawaban:</i>
2.	Kapan dan dari siapa anda mengetahui kebijakan program tersebut?
	<i>Jawaban:</i>
3.	Apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan dan keperluan usaha Anda? Jika belum, apa saja yang perlu dibenahi?
	<i>Jawaban:</i>
4.	Apakah ada pendampingan usaha dalam rangka pengelolaan usaha? Mengapa perlu dilakukan?
	<i>Jawaban:</i>
5.	Apakah Anda mengetahui maksud dan tujuan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)?
	<i>Jawaban:</i>
6.	Apakah ada sosialisasi atau bimbingan usaha sebelum Anda menerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) dari pihak pengelola program?
	<i>Jawaban:</i>
7.	Apakah pengelola program dalam melaksanakan pelayanan kepada Anda memuaskan? Mengapa?
	<i>Jawaban:</i>

8.	Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Anda mau menerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)?
	<i>Jawaban:</i>
9.	Apakah kendala didalam menjalankan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)?
	<i>Jawaban:</i>
10.	Apakah yang menyebabkan bantuan usaha Anda dapat berhasil atau gagal?
	<i>Jawaban:</i>
11.	Apakah ada pungutan yang tidak resmi dari pengelola program/petugas lapangan ? Berapa dan apa bentuknya?
	<i>Jawaban:</i>

IV. Pertanyaan untuk petugas dinas terkait

1.	Apakah Anda mengetahui dan terlibat dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin? Jika ya, apa saja bentuk pelaksanaannya?
	<i>Jawaban:</i>
2.	Apakah yang Anda ketahui tentang program pemberdayaan keluarga miskin ? Jika ya, dari mana Anda memperoleh pengetahuan tersebut?
	<i>Jawaban:</i>
3.	Apakah ada rapat koordinasi/sosialisasi program dari pengelola program kepada petugas di dinas terkait ?
	<i>Jawaban:</i>
4.	Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan keluarga miskin di kota Pangkalpinang?
	<i>Jawaban:</i>
5.	Sejak kapan Anda mengetahui adanya program pemberdayaan keluarga miskin?
	<i>Jawaban:</i>
6.	Permasalahan apa saja yang dihadapi oleh keluarga miskin di kota Pangkalpinang?
	<i>Jawaban:</i>
7.	Apakah kebijakan program pemberdayaan keluarga miskin di kota Pangkalpinang sudah berhasil? Jika tidak, apa yang harus dibenahi?
	<i>Jawaban:</i>

PEDOMAN OBSERVASI/LAPANGAN

1.	Kondisi lingkungan kehidupan lokasi sasaran penerima bantuan ?
	a. Kumuh b. Sedang c. Layak Huni d. Tidak Layak Huni
2.	Situasi sosial kemasyarakatan
	a. Akrab b. Renggang c. Biasa-biasa
3.	Kondisi usaha yang sedang dijalankan
	a. Berkembang b. Masih tetap c. Baru mulai tumbuh c. Mandiri
4.	Keadaaan hubungan sosial antar keluarga
	a. Akrab b. Renggang c. Biasa saja
5.	Kebiasaan hidup (ekonomi, sosial, budaya) dalam keluarga
6.	Sikap dan perilaku anggota keluarga
7.	Peran dan fungsi sosial kepala keluarga

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP/RINGKASAN HASIL WAWANCARA

NO.	VARIABEL/TOLOK UKUR	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana implementasi program pemberdayaan keluarga miskin di Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang	Yang diwawancarai adalah 1. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi/Kota/Kepala Bidang Bina Program/Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/Kepala Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan KAT/ Kepala Seksi Perencanaan Program/Kepala Seksi Monev dan Pelaporan. 2. Pendamping sosial/petugas/staf pelaksana 3. Penerima Bantuan 4. Waktu pelaksanaan bulan Mei-Juni 2010 5. Hasil wawancara ini berdasarkan jawaban yang paling banyak dan telah melalui proses peringkasan
	Tolok Ukur yang ditanyakan:	Secara ringkas dapat disampaikan sbb:
	a. Masukan (<i>input</i>)	
	<ul style="list-style-type: none"> pedoman atau acuan teknis; ketepatan sasaran pemberdayaan; tersedianya potensi dan sumber daya lokal; tersedianya fasilitas pemberdayaan; tersedianya petugas sosial dan pendamping sosial; tersedianya anggaran pemberdayaan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> Juklak/juknis tersedia namun belum sepenuhnya dapat dipedomani sebagai acuan pelaksanaan program secara komprehensif dan efektif. Sasaran pelayanan diberikan sesuai petunjuk. Sumber daya ada, tp belum dikelola sesuai potensi yang ada dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sarana/prasarana penunjang belum memadai dalam mendukung program pemberdayaan. Petugas dan pendamping sudah ada, tp pembinaannya belum terarah dan sesuai kebutuhan di lapangan. Anggaran ada namun belum memadai terutama dukungan alokasi APBD.
	b. Proses (<i>process</i>)	
	<ul style="list-style-type: none"> terlaksananya sosialisasi atau diseminasi program; terlaksananya keg. Pengumpulan data dan seleksi sasaran; terlaksananya kegiatan pengungkapan dan pemahaman kebutuhan; terlaksananya mobilisasi sumber lokal, terlaksananya kegiatan monitoring; evaluasi dan pelaporan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan, tapi masih bersifat pertemuan biasa, sehingga kurang berorientasi pada capaian hasil. Sebelum memperoleh bantuan, proses pengumpulan data dan seleksi sasaran. Bantuan diberikan sesuai dengan hasil penelusuran atau usulan dari keluarga miskin. Pengawasan dan evaluasi baru dilakukan sebatas proses penyaluran bantuan belum menyentuh substansi capaian program yang dilakukan
	c. Keluaran (<i>output</i>)	
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah keluarga yg diberdayakan oleh menteri/dinas terkait; Jumlah keluarga yang ditangani oleh masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah banyak keluarga miskin yang memperoleh bantuan melalui dana APBN dan ada juga dari APBD. Keterlibatan masyarakat secara langsung masih rendah, belum adanya upaya secara

		sinergis dan terprogram yang dilakukan pengelola program guna mempercepat penanganan masalah keluarga miskin.
	d. Manfaat (<i>outcomes</i>)	
	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah sasaran yang berdaya dan mandiri; • jumlah keluarga yang mampu menciptakan keharmonisan di lingkungan sosialnya; • jumlah keluarga yang memiliki rasa kepedulian sosial terhadap lingkungan sosialnya, dan; • jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan keluarga miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk data sasaran yang sudah dilayani ada, tapi jumlah keluarga miskin yang dikatakan mandiri belum ada secara pasti. • Tidak ada data jelas, hampir seluruh keluarga miskin mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. • Sebagian ada, namun tidak ada data • Masih sangat minim, hanya ada beberapa dunia usaha terutama BUMN yang telah melakukan pemberdayaan kepada keluarga miskin.
2	Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program pemberdayaan keluarga miskin	
	a. Masukan (<i>input</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan komitmen pemerintah daerah terutama komitmen anggaran
	b. Proses (<i>process</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas dan komitmen pengelola program didalam membangun komunikasi dan sinergisitas anggaran dan program lintas instansi/sektor/<i>stakeholders</i>
	c. Keluaran (<i>output</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keluarga miskin dalam mengembangkan keterampilan dan majamen usaha dan lemahnya fungsi serta peran pendamping sosial
	d. Manfaat (<i>outcomes</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial dunia usaha/masyarakat terutama kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap upaya pemberdayaan lingkungan sosialnya